SKRIPSI

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI ACEH

Disusun Oleh :

MUHAMMAD IRHAM
NIM: 210604064

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2026 M/ 1447 H

SKRIPSI

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI ACEH

Disusun Oleh :

MUHAMMAD IRHAM
NIM: 210604064

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	:	Muhammad Irham
NIM	:	210604064
Program Studi	:	Ilmu Ekonomi
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan isi saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Mei 2026
Yang menyatakan

Muhammad Irham

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

Muhammad Irham
NIM. 210604064

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat dalam penyelesaian pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Idaryani, S.E., M.Si	Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIP. 197505052025212011	NIP.198806082023212040

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601282019031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh

Muhammad Irham
NIM. 210604064

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Mei 2026 M
25 Dzulkaidah 1447 H

Banda Aceh,
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua	Sekretaris
Dr. Idaryani, S.E., M.Si	Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIP. 197505052025212011	NIP. 198806082023212040
Penguji I	Penguji II
Hafiizh Maulana, SP., S.H.I., ME	Fayeno Yunanda, S.E., M.Si
NIP. 199001062023211015	NIP. 199603162025052003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Muhammad Irham
NIM	: 210604064
Fakultas/Program Studi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
E-mail	: 210604064@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....

Yang berjudul:

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Mei 2026

Mengetahui,

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Irham	Dr. Idaryani, S.E., M.Si	Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIM. 210604064	NIP. 197505052025212011	NIP. 198806082023212040

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh"**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Uliya Azra, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Idaryani, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I serta Penasehat Akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ilmu Ekonomi. Jalilah, S.H.I., M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan serta arahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ilmu Ekonomi.
6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

7. Kedua orang tua tercinta. Ibunda dan Ayahanda, beserta kepada seluruh keluarga tercinta yang telah setiap detik, menit, dan jam memberikan kasih sayang, semangat, waktu, doa serta dorongan baik secara moril maupun materil, sehingga penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2021 yakni Rijalul, Ikhsan, Rajul, Hakim serta semuanya yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, inspirasi, doa, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 12 Mei 2026

Penulis,

Muhammad Irham

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	’
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا/ ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
◌ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
◌ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَال : *Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama	:	Muhammad Irham
NIM	:	210604064
Fakultas/Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul	:	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh
Pembimbing I	:	Dr. Idaryani, S.E., M.Si
Pembimbing II	:	Jalilah, S.H.I., M.Ag

Pengangguran terbuka masih menjadi permasalahan ekonomi di Provinsi Aceh yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi dan berfluktuasi, sehingga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi faktor penting yang memengaruhi kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder dari 23 kabupaten/kota periode 2017-2024, dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara parsial indeks pembangunan manusia memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sedangkan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Secara simultan kedua variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sehingga diperlukan kebijakan yang seimbang antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengaturan upah guna menekan pengangguran secara berkelanjutan.

Kata Kunci : ***Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Aceh***

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iii**
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ..... **iv**
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ..... **v**
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
1.5 Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI **11**
2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka 11
2.1.1 Teori Pengangguran 12
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran 14
2.1.3 Indikator Yang Mempengaruhi Pengangguran 15
2.2 Indeks Pembangunan Manusia 16
2.2.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia 17
2.2.2 Indikator Indeks Pembangunan Manusia 19
2.3 Upah Minimum Provinsi 22
2.3.1 Teori Upah Minimum Provinsi 23
2.3.2 Indikator Penetapan Upah Minimum 25
2.4 Hubungan Antar Variabel 26
2.4.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 26
2.4.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 27
2.5 Penelitian Terkait 28

2.6 Kerangka Berpikir 31
2.7 Hipotesis Penelitian 32

BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1 Desain Penelitian 33
3.2 Jenis dan Sumber Data 33
3.3 Sampel Penelitian 33
3.4 Variabel Penelitian 33
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 34
3.6 Metode Analisis Data 34
3.7 Teknik Analisis Data 35
3.8 Pemilihan Uji Regresi Data Panel 37
3.9 Pengujian Hipotesis Penelitian 38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 40
4.2 Analisis Statsitik Deskriptif 41
4.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka 42
4.2.2 Indeks Pembangunan Manusia 44
4.2.3 Upah Minimum Provinsi 45
4.3 Analisis Penelitian Model Regresi Data Panel 46
4.3.1 Uji Chow (*Chow-Test*) 47
4.3.2 Uji Hausman (*Hausman-Test*) 47
4.4 Uji Asumsi Klasik 47
4.4.1 Uji Multikolineritas 47
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 48
4.5 Model Regresi Data Panel 49
4.6 Pengujian Hipotesis Penelitian 50
4.6.1 Uji Parsial (Uji-t) 50
4.6.2 Uji Simultan (Uji-f) 51
4.6.3 Koefisien Determinasi (R2) 51
4.7 Pembahasan dan Hasil Penelitian 51
4.7.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 51
4.7.2 Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 53

BAB V PENUTUP 55
5.1 Kesimpulan 55

5.2 Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 57

DAFTAR LAMPIRAN 61

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (Poin) dan Upah Minimum Provinsi (Rupiah) Provinsi Aceh 2017-2024 5
Tabel 2.1 Nilai IPM 21
Tabel 2.2 Penelitian Terkait 29
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 34
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif 42
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow (*Chow-test*) dan Uji Hausman (*Hausman-test*) 46
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 48
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 48
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Data Panel Metode *Fixed Effect Model* (FEM) 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka 2017-2024 (Persen) 2
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 31
Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian 40
Gambar 4.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh 43
Gambar 4.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Provinsi Aceh 44
Gambar 4.4 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Provinsi Aceh 45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Aceh 61
Lampiran 2. Analisis Statsitik Deskriptif 65
Lampiran 3. Uji Chow 66
Lampiran 4. Uji Hausman 66
Lampiran 5. Estimasi Data Panel Metode Fixed Effect Model (FEM) 66
Lampiran 6. Uji Multikolinearitas 67
Lampiran 7. Uji Heteroskedastisitas 67

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan modal penting bagi pembangunan Indonesia. Jika suatu aset penting tidak dikelola secara optimal, maka hal tersebut berisiko menimbulkan berbagai permasalahan di masa mendatang. Sebagaimana halnya dalam pengelolaan kependudukan pada sektor ketenagakerjaan. Pengangguran yang tinggi menimbulkan permasalahan tersendiri di Indonesia. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh individu dengan tingkat pendidikan dasar hingga menengah, sementara proporsi tenaga kerja berpendidikan menengah atas dan tinggi relatif lebih kecil. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja. Angkatan kerja tidak hanya berperan sebagai pencari kerja, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak utama dalam penciptaan lapangan pekerjaan melalui aktivitas kewirausahaan. Oleh karena itu, upaya pengurangan pengangguran tidak dapat semata-mata bergantung pada penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah maupun investasi swasta dan asing, melainkan juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas dan kemandirian tenaga kerja agar mampu menciptakan peluang usaha secara mandiri (Marliana, 2022).

Pengangguran merupakan permasalahan ekonomi karena menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dalam kegiatan produksi. Ketika sebagian penduduk tidak bekerja, potensi untuk menghasilkan barang dan jasa menjadi tidak terealisasi secara maksimal, sehingga berdampak pada menurunnya output nasional dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengangguran juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Individu yang tidak memiliki pekerjaan cenderung menghadapi tekanan ekonomi akibat keterbatasan pendapatan, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan. Lebih jauh, dampak pengangguran tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan kemanusiaan, seperti meningkatnya stres, hilangnya rasa percaya diri, serta ketidakpastian terhadap masa depan. Oleh karena itu, meskipun biaya ekonomi dari pengangguran dapat diukur secara kuantitatif, dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan sulit untuk dinilai secara pasti dengan satuan moneter (Syahputra, Erfit, & Nurhayani, 2019).

Pengangguran terbuka umumnya banyak dijumpai pada kelompok usia muda yang baru menyelesaikan pendidikan, baik pada jenjang menengah maupun tinggi. Hal ini terjadi karena

lulusan baru cenderung memiliki preferensi pekerjaan tertentu yang sesuai dengan aspirasi dan tingkat pendidikannya, seperti bekerja di sektor formal atau perkantoran. Dalam proses tersebut, mereka seringkali bersedia menunggu untuk memperoleh pekerjaan yang dianggap layak, sehingga memperpanjang masa pencarian kerja. Selain itu, terdapat kecenderungan bagi tenaga kerja muda untuk mencari peluang kerja di wilayah perkotaan, provinsi maju, atau daerah dengan tingkat industrialisasi yang lebih berkembang. Mobilitas ini menyebabkan konsentrasi pencari kerja meningkat di wilayah tersebut, yang pada akhirnya mendorong tingginya tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan atau pusat industri. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka cenderung lebih rendah di wilayah yang aktivitas ekonominya masih didominasi oleh sektor tradisional, terutama pada daerah dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, karena masyarakatnya lebih cepat terserap dalam pekerjaan yang tersedia meskipun dengan produktivitas yang terbatas (Syahputra, Erfit, & Nurhayani, 2019).

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, seharusnya memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Namun, kenyataannya Aceh masih menghadapi masalah pengangguran yang signifikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Aceh (2024), tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh cenderung fluktuatif dalam kurun waktu tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya pembangunan, belum semua lapisan masyarakat dapat mengakses pekerjaan yang layak.

Gambar 1.1

Tingkat Pengangguran Terbuka 2017-2024 (Persen)

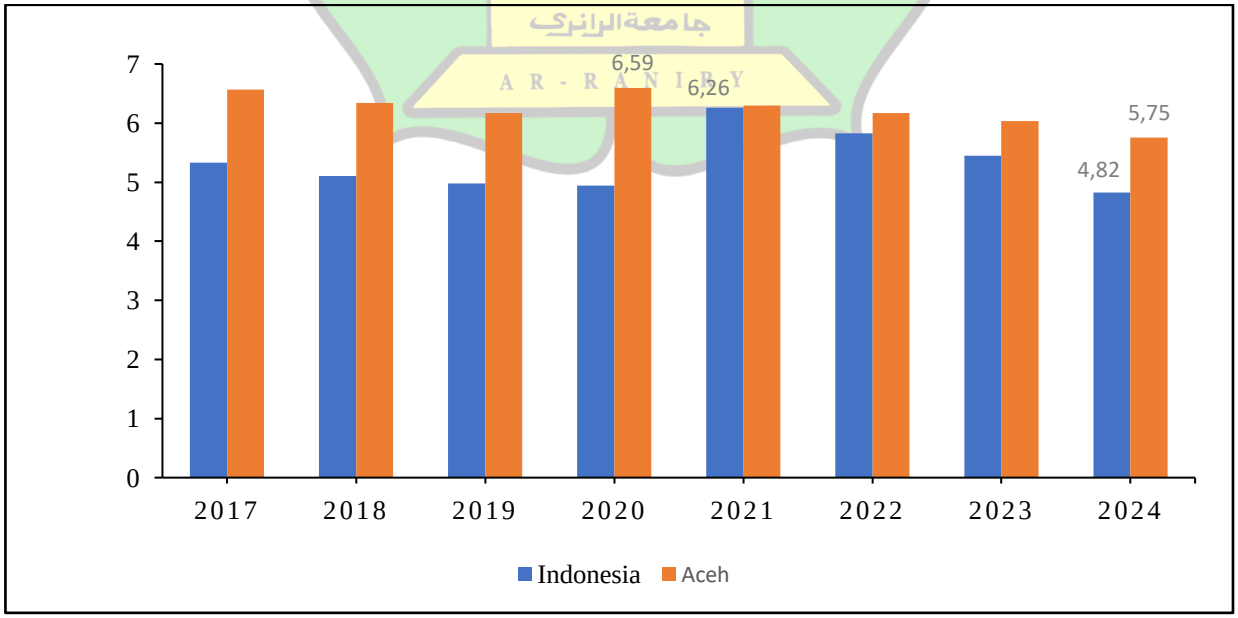

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Pada Gambar 1.2 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) provinsi Aceh dibandingkan dengan rata-rata nasional (Indonesia) untuk periode 2017–2024. Secara keseluruhan Aceh menunjukkan angka TPT yang lebih tinggi setiap tahun dibandingkan rata-rata nasional; pada 2017 Aceh tercatat 6,57% sedangkan nasional 5,33%, dan pada 2024 Aceh 5,75% dibandingkan nasional 4,82%. Dari 2017 hingga 2019 terdapat penurunan ringan di kedua garis, namun pada 2020 dan 2021 terjadi lonjakan yang paling tajam di tingkat nasional (puncak nasional 6,26% pada 2021) dan puncak Aceh pada 2020 (6,59%), yang konsisten dengan adanya guncangan pasar tenaga kerja selama periode pandemi. Setelah puncak tersebut, baik nasional maupun Aceh menunjukkan tren penurunan TPT sepanjang 2022–2024, meskipun level Aceh tetap berada di atas nasional dan selisih antarkeduanya menyempit paling tajam pada 2021 (hampir setara) sebelum melebar kembali pada tahun-tahun berikutnya. Perbedaan struktural ini menunjukkan adanya faktor lokal seperti komposisi sektor ekonomi, kapasitas penyerapan tenaga kerja, dan tingkat informalitas yang kemungkinan besar mempengaruhi ketahanan pasar tenaga kerja Aceh lebih lemah dibandingkan rata-rata nasional. Untuk analisis kebijakan yang lebih mendalam perlu dilakukan pemecahan menurut kelompok umur, tingkat pendidikan, sektor ekonomi, serta partisipasi angkatan kerja, kebijakan yang layak dipertimbangkan meliputi program penciptaan lapangan kerja padat karya, peningkatan pelatihan vokasional, dan upaya diversifikasi ekonomi lokal untuk menurunkan TPT secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Pengangguran yang tinggi di Aceh dapat berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial dan kestabilan ekonomi lokal. Berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat, kurangnya lapangan kerja di sektor formal, serta rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dianggap menjadi penyebab utama dari permasalahan ini (Badan Pusat Statistik Aceh, 2025). Selain itu, Provinsi Aceh yang memiliki riwayat konflik berkepanjangan serta pernah terdampak bencana alam besar berupa tsunami pada tahun 2004 turut memengaruhi proses pemulihan ekonomi yang berjalan relatif lambat serta menyebabkan ketidakstabilan pada sektor ketenagakerjaan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk terus melakukan berbagai program dan kebijakan guna menurunkan tingkat pengangguran, seperti pengembangan sektor industri kreatif, pelatihan keterampilan kerja, dan penyediaan modal usaha bagi UMKM. Namun, efektivitas program-program tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh sangat penting untuk dilakukan guna memberikan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan ini dan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian Marliana (2022) bahwa tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, inflasi, serta faktor-faktor lainnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suroya dan Erdkhadifa (2023) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka yaitu PDRB, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk. Dari beberapa faktor yang dinyatakan dalam dua jurnal di atas, indeks pembangunan manusia mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam meningkatkan daya serap tenaga kerja, sedangkan upah minimum provinsi mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja, sehingga perubahannya dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja dan pada akhirnya berdampak terhadap tingkat pengangguran terbuka. Meskipun kedua indikator tersebut cenderung meningkat, tingkat pengangguran terbuka di Aceh masih berfluktuasi, sehingga keduanya dinilai tepat untuk menganalisis dinamika pengangguran. Selain itu, Indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi lebih spesifik menyentuh aspek fundamental ketenagakerjaan, yaitu kualitas tenaga kerja dan kebijakan upah. Oleh karena itu, kedua variabel ini dinilai relevan dan strategis untuk dianalisis dalam menjelaskan variasi Tingkat Pengangguran Terbuka, khususnya di Provinsi Aceh, karena dapat memberikan gambaran apakah pengangguran lebih dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia atau oleh kebijakan pengupahan yang berlaku. Dari penjelasan di atas kita dapat mempertahankan dua faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, yaitu indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi.

Badan Pembangunan PBB (*United Nations Development Programme)*, mendefinisikan bahwa pembangunan manusia adalah suatu metode di mana perkembangan penduduk dalam hal memilih pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan lebih mudah. Terdapat empat isu utama yang harus diperhatikan pada proses pembangunan manusia ialah daya produksi, pemerataan, berkepanjangan dan pemantapan. Indeks Pembangunan Manusia ialah sebuah alat ukur yang dipakai untuk melihat pengaruh dari akibat pembangunan daerah dalam dimensi sangat luas, yang menunjukkan kualitas penduduk daerah dari segi harapan hidup, edukasi dan taraf hidup yang layak Indeks Pembangunan Manusia juga dipakai menjadi alat politik untuk mengukur tingkat kesentosaan secara umum dikarenakan bisa mengilustrasikan variabel ekonomi dan non ekonomi (Siahaan et al., 2022). Berikut tabel Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh periode tahun 2017-2024:

Tabel 1.1

Indeks Pembangunan Manusia (Poin) dan Upah Minimum Provinsi (Rupiah) Provinsi Aceh 2017-2024

Tahun	IPM	UMP
2017	70,6	2.500.000
2018	71,19	2.700.000
2019	71,90	2.916.810
2020	71,99	3.165.030
2021	72,18	3.165.031
2022	72,80	3.166.460
2023	73,40	3.413.666
2024	73,03	3.460.672

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Disnakermobduk Aceh (2026)

Pada Tabel 1.1 nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah terjadi pada awal periode pengamatan, yaitu sebesar 70,6, sedangkan nilai tertinggi berada pada akhir periode pengamatan sebesar 74,03. Rendahnya IPM pada awal periode menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia masih relatif terbatas, yang dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, akses layanan kesehatan yang belum optimal, serta pendapatan masyarakat yang masih rendah. Seiring waktu, IPM mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat. Tingginya nilai IPM pada akhir periode dipengaruhi oleh meningkatnya akses pendidikan, membaiknya fasilitas kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat, serta adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki nilai terendah sebesar Rp2.500.000 pada awal periode pengamatan dan nilai tertinggi sebesar Rp3.460.672 pada akhir periode. Rendahnya UMP pada awal periode dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang masih berkembang, tingkat produktivitas tenaga kerja yang belum optimal, serta kemampuan perusahaan dalam memberikan upah yang masih terbatas. Di sisi lain, peningkatan UMP hingga mencapai nilai tertinggi menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Tingginya UMP dipengaruhi oleh kenaikan kebutuhan hidup layak, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan perkembangan aktivitas usaha di daerah tersebut. (Badan Pusat Statistik, 2024).

Berdasarkan data di Provinsi Aceh, meskipun dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran masih tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kualitas pembangunan manusia dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Manusia merupakan aset utama dalam pembangunan suatu bangsa. Apabila masyarakat memiliki harapan hidup yang tinggi, kondisi kesehatan yang optimal, serta tingkat pendidikan yang memadai, maka tingkat produktivitas yang dihasilkan juga cenderung mengalami peningkata. Peningkatan produktivitas tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan dan pencapaian standar hidup yang layak. Selain itu, wilayah atau negara dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan manusia. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah penduduk akan memperbesar ketersediaan tenaga kerja. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini berpotensi mendorong peningkatan kapasitas produksi, selama didukung oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai.. Namun, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tercermin dari IPM perlu diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang mendukung, salah satunya melalui penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sesuai, agar tenaga kerja yang produktif dapat terserap secara optimal dan memperoleh imbalan yang layak sesuai standar hidup yang diharapkan (Erlangga et al., 2024).

Upah minimum adalah salah satu variabel yang memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran, sekaligus berperan sebagai indikator penting dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara. Penetapan upah minimum oleh pemerintah berfungsi sebagai batas bawah upah bagi pekerja di sektor formal, dengan tujuan melindungi kesejahteraan tenaga kerja serta menjamin bahwa pekerja memperoleh pendapatan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Namun, Kebijakan ini memiliki berbagai macam dampak tergantung kondisi ekonomi setempat dan bagaimana penerapan kebijakan tersebut (Erlangga et al., 2024).

Di Indonesia, setiap wilayah baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota, memiliki karakteristik teritorial serta potensi sumber daya alam yang beragam, hal inilah yang dapat menyebabkan alasan kenapa upah minimum setiap daerah berbeda. Upah pada dasarnya merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai jasa atau kinerja yang telah dilakukannya (Suparmono, 2018). Menurut Todaro & Smith (2020), menjelaskan bahwa upah merupakan pembayaran dalam bentuk uang yang diberikan kepada pekerja berdasarkan kesepakatan kerja, di mana pekerja melaksanakan tugas di bawah arahan dan ketentuan tertentu. Sedangkan menurut (Sukirno, 2008), mendefinisikan upah dalam perspektif ekonomi sebagai balas jasa atas tenaga kerja yang disumbangkan, baik dalam bentuk fisik maupun mental. Jadi

dapat dipahami bahwa, upah minimum merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja atas kinerja yang dihasilkannya, dengan standar besaran yang ditetapkan berdasarkan wilayah atau kondisi regional tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada Pasal 1 ayat 30, upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Pembayaran tersebut ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat mencakup tunjangan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Selanjutnya, pada Pasal 88 ayat 4 ditegaskan bahwa penetapan upah minimum dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, tingkat upah yang diterima tenaga kerja sering kali tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga (inflasi) yang berdampak pada penurunan daya beli pada tingkat pendapatan tertentu. Fenomena yang umum terjadi adalah kenaikan harga barang dan kenaikan upah tidak berlangsung secara simultan maupun dalam proporsi yang seimbang. Dalam kajian ekonomi, upah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu upah nominal dan upah riil. Upah nominal merujuk pada sejumlah uang yang diterima oleh tenaga kerja sebagai kompensasi atas kontribusi tenaga fisik maupun mental dalam proses produksi. Sementara itu, upah riil mencerminkan kemampuan dari upah nominal tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang diukur berdasarkan daya beli terhadap barang dan jasa (Sadono, 2006).

Penetapan upah memiliki dampak positif dari sisi penawaran tenaga kerja karena tingkat upah yang lebih tinggi cenderung mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam pasar kerja, sehingga berpotensi mengurangi pengangguran. Namun, dari perspektif permintaan tenaga kerja, kebijakan ini dapat memiliki dampak negatif, karena upah tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memberatkan perusahaan dan mengakibatkan berkurangnya jumlah pekerja yang diserap di suatu wilayah (Sahara & Iryani, 2023).

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan temuan dan kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti & Imaningsih (2022) mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan tidak siginifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, artinya setiap meningkatnya IPM dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan Pendapat Garnella, A. Wahid, & Yulindawati (2020), justru menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran

terbuka, khususnya di Provinsi Aceh. Artinya, semakin tinggi indeks pembangunan manusia seharusnya semakin rendah tingkat pengangguran terbuka. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soeharjoto & Oktavia (2021) mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung berdampak pada penurunan tingkat pengangguran di Indonesia, sedangkan penurunan IPM berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Kondisi ini sejalan dengan teori pertumbuhan baru *(new growth theory*) yang menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia yang tercermin melalui IPM memiliki pengaruh terhadap dinamika tingkat pengangguran.

Menurut Sahputra, Salmah & Sujadi (2024), bahwa variabel upah minimum regional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Kota Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi upah minimum regional maka akan berakibat terjadinya penurunan pengangguran terbuka di Kota Mataram, begitupun sebaliknya. Peningkatan upah yang terjadi di Kota Mataram mendorong lebih banyak orang untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi standar kehidupan layak karena samakin tinggi atau besar upah maka gaya hidup dan kebutuhan dasar masyarakat juga meningkat. Sehingga, membuat tingkat pengangguran di Kota Mataram menurun. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahara & Iryani (2023), menyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan pendapat Salsabila et al. (2024), variabel Upah Minimum Provinsi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, yang menunjukkan bahwa perubahan, baik peningkatan maupun penurunan Upah Minimum Provinsi, memiliki dampak terhadap fluktuasi tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan Hadi, Riani & Haryatiningsih (2022), bahwa variabel Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan sedangkan variabel upah minimum provinsi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan menurut Marliana (2022), indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan dan variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian dan kondisi latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan wilayah studi yang difokuskan pada Provinsi Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengusung judul: **"Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh"**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka diProvinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di provinsi Aceh.
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh dari Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.
3. Untuk dapat mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumber referensi yang bermanfaat bagi para peneliti dan para pembaca mengenai Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.
2. Bagi Pemerintah

   Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk membangun ekonomi yang lebih unggul.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun struktur pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau landasan teori yang relevan dengan penelitian ini, ruang lingkup variabel penelitian, penelitian terkait, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat secara terperinci tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu desain penelitian, jenis dan sumber data, sampel penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, metode analisis data, teknik analisis data, pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan deskripsi objek dari penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan mengenai hasil analisis objek penelitian yang ada.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interprestasi data dan saran-saran atau rekomendasi yang berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu kiranya diambil oleh pihak-pihak yang terkait.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Permasalahan pengangguran merupakan persoalan strategis yang berkaitan erat dengan tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan merupakan salah satu ukuran pokok yang dipakai untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat yang akhirnya berkontribusi terhadap merosotnya tingkat kesejahteraan secara keseluruhan. Selain sebagai persoalan dalam bidang ketenagakerjaan, pengangguran juga termasuk dalam permasalahan ekonomi makro. Apabila kondisi ini berlangsung secara berkelanjutan, dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memicu tekanan psikologis yang negatif bagi individu. Dalam skala yang lebih luas, tingginya pengangguran berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan politik dalam suatu negara. (Purnamawati & Yuniarta, 2021).

Pengangguran dapat diartikan sebagai keadaan ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, tengah aktif mencari pekerjaan, hanya bekerja dalam waktu yang sangat terbatas (kurang dari dua hari dalam satu minggu), atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai dan layak. Fenomena ini menjadi pengangguran salah satu permasalahan utama dalam perekonomian, karena keberadaannya berdampak langsung terhadap penurunan tingkat produktivitas dan pendapatan masyarakat. Penurunan tersebut pada akhirnya berpotensi meningkatkan angka kemiskinan serta memunculkan berbagai permasalahan sosial lainnya. (Naf'an, 2022).

Pengangguran merupakan kondisi ketika individu yang tergolong dalam angkatan kerja memiliki keinginan untuk bekerja, namun belum berhasil memperoleh pekerjaan. Sementara itu, individu yang tidak bekerja tetapi tidak melakukan upaya aktif dalam mencari pekerjaan tidak termasuk dalam kategori penganggur.. Peningkatan jumlah pengangguran umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk usia kerja terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja akan menyebabkan meningkatnya jumlah individu yang tidak terserap dalam pasar kerja. Oleh karena itu, hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh penting dalam menentukan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah (Wati, Utami, & Nisa, 2024).

Pengangguran terbuka merupakan kondisi ketika individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan sama sekali, sehingga tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan ini sering kali menjadi beban, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi keluarganya. Pengangguran terbuka terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor internal, yaitu kondisi di mana individu tidak memperoleh pekerjaan meskipun telah berupaya mencarinya, atau adanya kecenderungan kurangnya motivasi untuk bekerja. Kedua, faktor eksternal, yaitu terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang terus meningkat. Selain itu, penurunan aktivitas ekonomi serta perkembangan teknologi yang mendorong efisiensi produksi juga dapat menyebabkan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja. Dampak dari pengangguran tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas serta prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengangguran dapat dikategorikan sebagai permasalahan ekonomi yang serius karena menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, sehingga diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasinya (Yudhistiara , 2022).

Menurut (Machmud, 2016) tingkat pengangguran terbuka mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang tergolong sebagai penganggur dalam angkatan kerja. Indikator ini diukur sebagai persentase antara jumlah penganggur dengan total angkatan kerja, yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{TPT = \frac{Pencari\ Kerja}{angkatan\ kerja} \times 100} \qquad (\mathbf{2.1})$$

Manfaat dari indikator tingkat pengangguran terbuka, baik yang dinyatakan dalam satuan jumlah (orang) ataupun dalam bentuk persentase, memiliki peran penting sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, khususnya dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Tingginya tingkat pengangguran terbuka mencerminkan besarnya jumlah angkatan kerja yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja. (Yudhistiara , 2022).

2.1.1 Teori Pengangguran

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan fenomena pengangguran di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

1) Teori Klasik

Menurut pandangan Teori Klasik, pengangguran dapat diminimalkan melalui optimalisasi sisi penawaran serta berfungsinya mekanisme harga dalam pasar bebas, yang diyakini

mampu menciptakan permintaan yang menyerap seluruh penawaran tenaga kerja. Pandangan klasik juga menyatakan bahwa pengangguran terjadi akibat adanya misalokasi sumber daya yang bersifat sementara, yang pada akhirnya dapat dikoreksi melalui mekanisme pasar (Sari S. G., 2020).

2) Teori Keynes

Teori Keynes bertolak belakang dengan Teori Klasik. Keynes berpendapat bahwa pengangguran muncul sebab rendahnya permintaan agregat dalam perekonomian. Kondisi ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bukan karena keterbatasan kapasitas produksi, melainkan karena rendahnya tingkat konsumsi masyarakat. Lebih lanjut, Keynes menegaskan bahwa permasalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Ketika jumlah tenaga kerja meningkat, tekanan terhadap pasar kerja dapat mendorong penurunan tingkat upah. Namun, penurunan upah justru berpotensi memperburuk kondisi perekonomian karena menurunkan daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada menurunnya permintaan agregat dan memperdalam tingkat pengangguran, Penurunan tingkat upah mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan permintaan, sehingga produsen berpotensi mengalami kerugian dan pada akhirnya tidak mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, dalam praktiknya tingkat upah cenderung bersifat kaku (rigid) dan tidak mudah mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, pandangan Teori Keynes dinilai memiliki keterbatasan dalam menjelaskan dinamika pasar tenaga kerja secara keseluruhan.

3) Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus sebagaimana dijelaskan dalam buku Ekonomi Sumber Daya Mulyadi (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pertumbuhan penduduk mengikuti pola deret ukur (*geometric progression*), seperti 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya, sedangkan produksi bahan makanan hanya meningkat menurut deret hitung (*arithmetic progression*), seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan tersebut, menurut Malthus, berpotensi menimbulkan krisis di masa depan. Ia memprediksi bahwa apabila tidak ada pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi tekanan besar terhadap ketersediaan sumber daya, yang pada akhirnya dapat memicu bencana kemanusiaan seperti kelaparan dan kemiskinan.

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator strategis dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan data dari (Badan Pusat Statistik Aceh, 2025), TPT merepresentasikan persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. Variasi tingkat pengangguran dipengaruhi oleh beragam faktor, baik ekonomi, sosial, maupun demografis yang saling berinteraksi. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, antara lain yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah yang umumnya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingginya pertumbuhan ekonomi akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

   Indeks Pembangunan Manusia merepresentasikan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Semakin tinggi IPM, maka kualitas tenaga kerja juga semakin baik sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan menjadi lebih besar. Maka dari itu, IPM umumnya berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

3. Investasi

   Investasi, baik dalam negeri maupun asing, berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan sektor industri dan jasa sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

4. Inflasi

   Inflasi secara umum mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa. Dalam jangka pendek, inflasi ringan dapat mendorong produksi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran. Oleh karena itu, pengaruh inflasi terhadap pengangguran dapat bersifat positif maupun negatif.

5. Jumlah Penduduk Dan Angkatan Kerja

   Besarnya jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Apabila pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka

akan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran. Dengan demikian, jumlah penduduk dan besarnya angkatan kerja cenderung memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengangguran.

6. Upah Minimum

   Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Namun, dalam praktiknya, kenaikan upah minimum dapat berdampak ganda. Di satu sisi meningkatkan pendapatan pekerja, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja dikarenakan meningkatnya biaya produksi. Hal ini menyebabkan upah minimum berpengaruh positif maupun negatif terhadap pengangguran.

7. Ketidaksesuaian Keterampilan (*Skill Mismatch*)

   Pengangguran juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Lulusan pendidikan yang tidak selaras dengan tuntutan industri cenderung menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, tingkat pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi semata, tetapi dapat juga dijelaskan melalui berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut (Sadono, 2010), pengangguran merupakan kondisi ketika di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Selanjutnya, menurut (Mankiw, 2018), pengangguran ialah kondisi ketika seseorang yang bersedia dan mampu bekerja pada tingkat upah yang berlaku tidak memperoleh pekerjaaan.. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam pasar tenaga kerja. Todaro & Smith (2020), mengatakan pengangguran di negara berkembang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dengan terbatasnya kesempatan kerja, terutama di sektor formal. Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa pengangguran adalah kondisi di mana tenaga kerja tidak terserap secara optimal dalam pasar kerja akibat tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

2.1.3 Indikator Yang Mempengaruhi Pengangguran

Menurut Gatiningsih dan Sutrisno (2017), pengangguran pada umumnya terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Kondisi ini menjadikan pengangguran sebagai permasalahan ekonomi yang signifikan, karena berdampak pada penurunan produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang

selanjutnya dapat memicu kemiskinan serta berbagai persoalan sosial lainnya. Adapun beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran dalam perekonomian suatu wilayah antara lain sebagai berikut:

1. Penurunan output dan pengeluaran total

   Ketika output dan total pengeluaran mengalami penurunan, permintaan terhadap tenaga kerja juga ikut menurun. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya jumlah pengangguran, karena kapasitas ekonomi yang ada tidak mampu mencapai tingkat produksi optimal.

2. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja

   Ketidaksesuaian ini terjadi ketika permintaan terhadap jenis tenaga kerja tertentu meningkat, sementara permintaan terhadap jenis lainnya menurun, sedangkan penawaran tenaga kerja tidak mampu menyesuaikan secara cepat. Pada tingkat upah yang berlaku, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang dibutuhkan.

3. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pencarian kerja

   Perbedaan preferensi, keterampilan, serta karakteristik pekerjaan menyebabkan proses pencarian kerja memerlukan waktu. Setiap pekerjaan menuntut keahlian yang berbeda serta menawarkan tingkat upah yang beragam, sehingga tenaga kerja cenderung membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan yang sesuai..

4. Perkembangan Teknologi

   Kemajuan teknologi mendorong terjadinya substitusi tenaga kerja dengan mesin yang lebih efisien. Akibatnya, kebutuhan terhadap tenaga kerja pada sektor tertentu menjadi berkurang, terutama bagi pekerja yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut.

2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut *Human Development Report* Badan Pusat Statistik Aceh (2022), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didefinisikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memperluas berbagai pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara berbagai pilihan tersebut, terdapat tiga aspek utama yang menjadi prioritas, yaitu kesempatan untuk hidup panjang dan sehat, memperoleh pendidikan atau pengetahuan, serta memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan guna mencapai standar hidup yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki cakupan yang luas karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam pengukurannya, dimensi kesehatan direpresentasikan melalui indikator angka harapan hidup saat lahir. Selanjutnya, dimensi pendidikan diukur menggunakan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur melalui indikator

pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan, sebagai pendekatan terhadap tingkat pendapatan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pembangunan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dari sisi sosial, penilaian dilakukan melalui indikator di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, dari sisi ekonomi, pengukuran didasarkan pada pendapatan per kapita yang telah disesuaikan. Pengintegrasian kedua aspek tersebut menjadikan IPM sebagai indikator yang komprehensif, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pembangunan manusia dalam suatu wilayah (Adam , 2021).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator komposit yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pembangunan manusia dengan mengacu pada berbagai aspek mendasar kualitas hidup. Perhitungan IPM sebagai ukuran pembangunan manusia memiliki peranan strategis, antara lain untuk menyusun indikator yang mampu merepresentasikan dimensi-dimensi esensial pembangunan manusia serta menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya (Sari, Nasrun, & Putri, 2020).

2.2.1 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Alkhoiriyah & Sa'roni (2021), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan sosial dan ekonomi pada tingkat daerah maupun negara. Untuk merealisasikan pembangunan manusia, pengukurannya dilakukan melalui kualitas hidup penduduk yang direpresentasikan oleh tiga komponen utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Dengan demikian, perhitungan IPM didasarkan pada data yang mampu mencerminkan ketiga dimensi tersebut secara komprehensif :

1. Pendidikan

   Dimensi pendidikan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) direpresentasikan melalui dua indikator utama, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat. Rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah rata-rata tahun yang telah ditempuh penduduk dalam pendidikan formal. Sementara itu, harapan lama sekolah mencerminkan perkiraan lamanya waktu yang diharapkan akan dijalani oleh anak dalam menempuh pendidikan formal di masa mendatang. Dalam proses perhitungannya, kedua indikator tersebut diberikan bobot yang berbeda, di mana rata-rata lama sekolah memiliki bobot sebesar sepertiga, sedangkan harapan lama sekolah memiliki bobot sebesar dua pertiga.

2. Kesehatan

   Dimensi kesehatan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui indikator angka harapan hidup penduduk yang dihitung dengan pendekatan tidak langsung. Dalam hal ini, data yang digunakan meliputi Angka Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), yang berfungsi untuk memperkirakan tingkat kelangsungan hidup penduduk sebagai refleksi dari derajat kesehatan masyarakat.

3. Daya Beli Masyarakat

   Indikator daya beli masyarakat mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk yang berkontribusi terhadap perbaikan kondisi perekonomian suatu daerah. Dalam pengukurannya, daya beli dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan, sehingga mampu merepresentasikan kemampuan konsumsi masyarakat secara lebih akurat..

Terdapat empat aspek utama yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan manusia, yaitu meliputi peningkatan produktivitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan, serta pemberdayaan masyarakat. Keempat aspek ini saling berkaitan dalam mendorong terciptanya kualitas hidup manusia yang lebih baik secara menyeluruh:

1. Produktivitas, mencerminkan kemampuan penduduk dalam meningkatkan hasil produksi barang atau jasa, di mana dalam kondisi bekerja secara penuh, tenaga kerja memperoleh tingkat upah yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja yang dihasilkan..
2. Pemerataan, mengacu pada kesetaraan kesempatan bagi seluruh penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi maupun sosial. Dalam kondisi tanpa hambatan akses, setiap individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan pada akhirnya berkontribusi terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat.
3. Kesinambungan, mengacu pada pemanfaatan sumber daya alam dan sosial yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhatikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial perlu dilakukan secara bijak dan berkelanjutan agar tetap tersedia serta dapat dimanfaatkan secara optimal di masa depan.
4. Pemberdayaan, mengacu pada keterlibatan aktif penduduk dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi arah kehidupan mereka, serta partisipasi dalam pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pembangunan (Alkhoiriyah & Sa'roni, 2021).

2.2.2 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan berbagai dimensi dasar kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk menilai sejauh mana capaian pembangunan manusia telah terealisasi. Perkembangan IPM diukur melalui pendekatan tiga dimensi utama yang secara langsung merepresentasikan kualitas hidup, yaitu kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur dengan indikator angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan tingkat kelangsungan hidup penduduk. Selanjutnya, dimensi pengetahuan diukur melalui kombinasi dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yang menggambarkan akses serta capaian pendidikan masyarakat. Adapun dimensi standar hidup layak diukur menggunakan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan, sebagai proksi pendapatan dalam mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, ketiga indikator tersebut secara komprehensif menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam suatu wilayah (Badan Pusat Statistik Aceh, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik Aceh (2022), setiap komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terlebih dahulu dinormalisasi dengan menggunakan batas nilai minimum dan maksimum sebelum diintegrasikan ke dalam perhitungan akhir. Proses standardisasi ini bertujuan untuk menyetarakan skala antar indikator sehingga dapat diperbandingkan secara proporsional.

A. Dimensi Kesehatan

1) Angka Harapan Hidup saat lahir

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas kesehatan penduduk dalam mendukung keberhasilan program pemerintah adalah Angka Harapan Hidup saat lahir. Indikator ini menggambarkan perkiraan rata-rata umur yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut kelompok umur tetap konstan sepanjang waktu. Adapun rumus perhitungan untuk indikator Angka Harapan Hidup saat lahir adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}} \qquad (\mathbf{2.2})$$

B. Dimensi Pendidikan

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas.

Dalam pengukurannya, digunakan batas minimum sebesar 0 tahun dan batas maksimum sebesar 15 tahun sesuai dengan standar internasional. Adapun perhitungan indikator rata-rata lama sekolah dilakukan sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \qquad (2.3)$$

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan jumlah tahun yang diperkirakan akan ditempuh dalam proses pendidikan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. Untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, indikator ini dihitung sebagai ekspektasi lama pendidikan yang akan dijalani. Perhitungan harapan lama sekolah menggunakan batas minimum dan maksimum yang merujuk pada standar internasional, dengan kisaran antara 0 (nol) hingga 18 tahun. Adapun formulasi perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \qquad (2.4)$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \qquad (2.5)$$

C. Dimensi Pengeluaran

1) Pengeluaran Rill per Kapita yang disesuaikan

Pengeluaran riil per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur capaian pembangunan manusia, khususnya dalam merepresentasikan standar hidup layak melalui kemampuan konsumsi masyarakat. Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan besarnya pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*), sehingga mampu menggambarkan kondisi riil daya beli masyarakat. Adapun perhitungan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dilakukan melalui proses standardisasi sebagai berikut:

$$I_{Pengeluaran} = \frac{in(Pengeluaran) - in(Pengeluaran_{min})}{in(Pengeluaran_{maks} - in(Pengeluaran_{\min})} \qquad (2.6)$$

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung dengan menggunakan pendekatan rata-rata geometris dari ketiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pendekatan ini digunakan untuk mencerminkan keseimbangan capaian antar dimensi, sehingga kekurangan pada salah satu dimensi akan memengaruhi nilai IPM secara keseluruhan., IPM dihitung sebagai berikut menggunakan rumus rata-rata Geometris:

$$\boldsymbol{IPM} = \sqrt[3]{\boldsymbol{I_{Kesehatan}} \times \boldsymbol{I_{Pendidikan}} \times \boldsymbol{I_{Pengeluaran}}} \qquad (\mathbf{2.7})$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung menggunakan pendekatan rata-rata geometris yang dinilai lebih sensitif terhadap ketimpangan capaian antar dimensi pembangunan. Metode ini memastikan bahwa nilai indikator yang rendah tidak dapat sepenuhnya dikompensasi oleh indikator lain yang bernilai tinggi. Mengacu pada konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), capaian IPM dinyatakan dalam skala 0,0 hingga 100,0 dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 2.1

Nilai IPM

Nilai IPM	Status
< 60	Rendah
60 ≤ IPM < 70	Sedang
70 ≤ IPM < 80	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan tingkat capaian pembangunan manusia. Setelah ketiga dimensi tersebut dihitung (dan dinormalisasi ke skala 0–100), hasil akhirnya adalah nilai IPM. Untuk memudahkan interpretasi dan perbandingan, nilai IPM dikelompokkan dalam empat status:

1. IPM ≤ 60 → Rendah

   Pada rentang ini, rata-rata harapan hidup cenderung pendek, tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah masih rendah, serta pendapatan per kapita minim. Wilayah dengan status ini umumnya menghadapi tantangan besar dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan dasar, dan kesempatan ekonomi.

2. 60 < IPM ≤ 70 → Sedang

   Masyarakat sudah mulai menikmati perbaikan: angka harapan hidup meningkat (misalnya menuju pertengahan 60-an tahun), akses dan lama pendidikan dasar-menengah membaik, dan pendapatan per kapita tumbuh moderat. Namun, kualitas layanan dan pemerataan masih perlu ditingkatkan agar bisa naik ke kategori berikutnya.

3. 70 < IPM ≤ 80 → Tinggi

   Di sini indikator-indikator utama sudah berada pada level baik: harapan hidup mendekati atau di atas 70 tahun, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah melebihi standar menengah, dan pendapatan per kapita sudah cukup untuk menunjang kebutuhan dasar serta mulai mendukung gaya hidup yang lebih layak. Wilayah dengan status "Tinggi" biasanya memiliki infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang relatif lengkap.

4. IPM ≥ 80 → Sangat Tinggi

   Merupakan puncak prestasi pembangunan manusia: harapan hidup di atas 75–80 tahun, hampir semua warga berpendidikan menengah-ke-tinggi, dan pendapatan per kapita sudah sangat memadai. Wilayah ini sanggup menyediakan layanan kesehatan mutakhir, pendidikan tinggi, serta kesempatan ekonomi dan sosial yang luas.

2.3 Upah Minimum Provinsi

Upah kerja, yang biasa dikenal di Indonesia sering disebut sebagai gaji, merupakan bentuk balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja dalam wujud uang berdasarkan periode waktu tertentu. Sementara itu, upah minimum adalah tingkat upah terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan dengan serikat pekerja. Dalam perspektif ekonomi, upah pada dasarnya dipahami sebagai harga yang diberikan kepada tenaga kerja atas kontribusinya dalam proses produksi, sebagaimana faktor produksi lainnya. Dengan demikian, upah mencerminkan imbalan atas jasa yang disediakan pekerja kepada pengusaha dalam menghasilkan barang atau jasa. Selain itu, upah juga dapat dimaknai sebagai kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil kerja tertentu, yang tidak selalu bersifat periodik. Dalam penggunaannya, istilah upah seringkali disandingkan dengan istilah lain seperti kompensasi dan imbalan. Secara umum, dalam kajian ekonomi, ketiga istilah tersebut memiliki makna yang relatif serupa, yaitu sebagai bentuk penghargaan finansial atas kontribusi tenaga kerja dalam kegiatan produksi (Suhartini et al., 2020).

Gaji bersih atau upah merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan atau pekerja setiap bulan, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang disalurkan oleh perusahaan, organisasi, atau pemberi kerja. Jika diberikan dalam bentuk barang, nilainya disesuaikan dengan harga pasar

yang berlaku di wilayah setempat. Gaji bersih mencerminkan pendapatan yang diterima setelah dikurangi berbagai potongan, seperti kontribusi wajib, pajak penghasilan, dan potongan lainnya (Disnakermobduk, 2024). Sementara itu, upah dapat diartikan sebagai kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan, berdasarkan kesepakatan bersama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran upah ini mencakup gaji pokok maupun tunjangan yang diperuntukkan bagi pekerja beserta keluarganya.

Dalam menetapkan tingkatan upah, perusahaan dan karyawan menanggapi situasi yang ada di pasar kerja. Pada saat produksi dan kesempatan kerja melimpah, upah biasanya meningkat dengan cepat. Sebaliknya, saat produksi dan kesempatan kerja menurun, peningkatan upah menjadi lebih lambat dan bahkan bisa saja menurun (Dornbusch & Startz, 2008).

Upah merupakan sejumlah pembayaran dalam bentuk uang yang diterima pekerja dari perusahaan sebagai balasan atas kontribusi kerja yang telah dilakukan, sebagaimana diatur dan disepakati dalam hubungan kerja. Tingkat upah minimum yang diterapkan di suatu wilayah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui kebijakan resmi yang mempertimbangkan kondisi setempat dan peraturan yang berlaku. Secara konsep, penentuan upah minimum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PED) (Sumarsono, 2018).

2.3.1 Teori Upah Minimum Provinsi

1) Teori Malhtus

Teori ini memandang bahwa tingkat upah memiliki keterkaitan yang erat dengan dinamika pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai variabel strategis dalam menjelaskan berbagai fenomena ekonomi, termasuk pembentukan tingkat upah. Dalam kerangka ini, upah ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sebagai harga atas penggunaan tenaga kerja, tingkat upah dipengaruhi secara langsung oleh besarnya penawaran tenaga kerja, yang sumber utamanya berasal dari penduduk usia kerja (Arfida, 2007). Apabila jumlah penduduk meningkat, maka penawaran tenaga kerja juga akan bertambah, sehingga berpotensi menekan tingkat upah. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk menurun, maka penawaran tenaga kerja akan berkurang dan cenderung mendorong kenaikan tingkat upah. Dari sudut pandang lain, upaya peningkatan upah dinilai tidak memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa peningkatan upah dapat mendorong peningkatan kesejahteraan, yang kemudian berpotensi memicu kecenderungan

masyarakat untuk memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar, sehingga pada akhirnya meningkatkan kembali penawaran tenaga kerja.

Ketika tingkat upah mengalami penurunan, kemampuan ekonomi masyarakat cenderung melemah. Kondisi ini mendorong individu untuk lebih berhemat dalam pengeluaran, termasuk mempertimbangkan kembali keputusan terkait jumlah anggota keluarga. Dalam situasi tersebut, terdapat kecenderungan untuk membatasi jumlah anak, sehingga laju pertumbuhan penduduk dapat menurun. Penurunan jumlah penduduk ini pada akhirnya akan mengurangi penawaran tenaga kerja, yang kemudian berpotensi mendorong kenaikan tingkat upah kembali ke posisi sebelumnya. Dengan demikian, dalam jangka panjang, tingkat upah akan berfluktuasi mengikuti dinamika perubahan jumlah penduduk, namun cenderung bergerak menuju keseimbangan awalnya (Priyono & Ismail, 2012).

2) Teori Jhon Stuart Mill

John Stuart Mill berpendapat bahwa tingkat upah pada dasarnya cenderung tidak mengalami perubahan signifikan dari tingkat awalnya, meskipun dengan argumentasi yang berbeda. Menurutnya, dalam kegiatan usaha, pengusaha telah mengalokasikan sejumlah dana tertentu sering dikaitkan dengan konsep dana upah (*wage fund*) yang khusus diperuntukkan bagi pembayaran tenaga kerja pada saat investasi dilakukan. Oleh karena itu, tingkat upah relatif terbatas oleh besaran dana yang telah ditetapkan tersebut dan tidak mudah mengalami perubahan yang besar. Berdasarkan pandangan dua tokoh klasik ini, muncul kesan pesimisme terhadap dinamika upah, di mana tingkat upah diperkirakan hanya akan berputar pada level yang relatif rendah. Tingkat tersebut umumnya berada pada batas minimum yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Konsep "mempertahankan" di sini mengandung implikasi bahwa standar kehidupan cenderung mengikuti kondisi yang telah ada sebelumnya; apabila kondisi masa lalu berada pada tingkat rendah, maka kecenderungannya kondisi di masa mendatang juga akan tetap berada pada tingkat yang serupa (Mulyaningsih, 2019).

3) Teori Kelompok Neoklasik

Teori ini pada dasarnya sejalan dengan dua teori sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat upah cenderung berada pada tingkat yang relatif rendah. Namun demikian, terdapat pembaruan penting yang mengoreksi pandangan pesimistis tersebut. Dalam perspektif ini, tingkat upah tidak semata-mata terbatas pada tingkat minimum, melainkan dapat meningkat sepanjang sejalan dengan nilai produk marginal tenaga kerja. Dalam kerangka teori neoklasik, tingkat upah ditentukan oleh nilai pasar dari produk marginal yang dihasilkan tenaga kerja. Oleh karena itu, tingkat upah tidak bersifat seragam bagi seluruh pekerja, karena setiap individu

memiliki tingkat produktivitas yang berbeda. Perbedaan produktivitas ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia atau modal insani yang dimiliki, seperti tingkat pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, serta kondisi kesehatan. Semakin tinggi investasi pada modal insani, maka semakin tinggi pula kualitas tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan tingkat upah. Dengan demikian, pemikiran neoklasik memberikan perspektif yang lebih optimis dibandingkan teori klasik, dan hingga saat ini masih menjadi salah satu pendekatan dominan dalam menjelaskan penentuan tingkat upah (Putri, 2025).

2.3.2 Indikator Penetapan Upah Minimum

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013, penetapan upah minimum dilakukan dengan berlandaskan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan tetap mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat inflasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya KHL melalui penyesuaian besaran upah minimum agar sesuai dengan nilai KHL pada periode yang bersangkutan.

Menurut Bersales (2014), penetapan upah minimum juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, di antaranya sebagai berikut:

1) Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan alat ukur di mana menilai total pengeluaran untuk barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat (Mankiw, 2018). IHK berfungsi untuk mengamati fluktuasi biaya hidup dari masa ke masa dan untuk mengetahui seberapa besar penyesuaian pendapatan yang dibutuhkan untuk menjaga agar standar hidup tetap stabil.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja diartikan sebagai seluruh penduduk usia kerja yang mencakup individu yang sedang bekerja maupun yang belum memperoleh pekerjaan (Mankiw, 2018). Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang kerap digunakan untuk menilai seberapa banyak penduduk usia kerja berpartisipasi dalam kegiatan di pasar tenaga kerja.

3.) Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di suatu wilayah selama periode tertentu, yang dihitung berdasarkan harga pasar (Mankiw, 2018). Dalam penggunaannya, data PDRB tidak hanya berfungsi untuk mengukur total produksi, tetapi juga sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

4) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita dapat diartikan sebagai rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh setiap penduduk dalam sebuah negara dengan jangka waktu tertentu (Sukirno, 2008). Tingkat kemakmuran masyarakat dinilai meningkat apabila pendapatan per kapita berdasarkan harga konstan atau pendapatan per kapita riil terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

2.4 Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel adalah keterkaitan atau ketergantungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu penelitian, di mana perubahan pada satu variabel diharapkan berkaitan secara sistematis dengan perubahan pada variabel lainnya. Dengan kata lain, memahami hubungan antar variabel membantu peneliti menjawab pertanyaan "apakah dan bagaimana variabel variabel tersebut saling memengaruhi" dalam kerangka hipotesis atau teori yang diuji (Sugiono, 2020).

2.4.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut Todaro dan Smith (2009) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator komposit yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Indeks ini mengintegrasikan capaian dalam tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, serta pendapatan riil per kapita yang telah disesuaikan. Kehadiran IPM pada dasarnya merupakan bentuk kritik sekaligus penyempurnaan terhadap penggunaan pendapatan per kapita sebagai satu-satunya ukuran kesejahteraan. Pendekatan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dinilai belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kenyataannya, tingkat kemakmuran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, IPM dikembangkan sebagai ukuran yang lebih komprehensif dengan menggabungkan tiga komponen utama, yaitu daya beli masyarakat (pendapatan), tingkat pendidikan, dan kondisi kesehatan. Melalui pendekatan multidimensional ini, pengukuran kesejahteraan masyarakat menjadi lebih representatif karena tidak hanya mencerminkan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang berperan penting dalam pembangunan manusia. IPM berfokus pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketika IPM mengalami peningkatan maka akan diikuti dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan. Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja karena dapat menghasilkan produksi lebih banyak. Ketika produktivitas tenaga kerja meningkat

maka permintaan akan tenaga kerja juga akan meningkat sehingga dapat mengurangi pengangguran (Potabuga, Rorong, & Siwu, 2024).

Berbagai kajian panel yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkorelasi negatif dan signifikan dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Garnella, Wahid, & Yulindawati (2020) menyatakan bahwa setiap kenaikan IPM di Provinsi Aceh pada periode 2011 – 2018 diikuti oleh penurunan TPT secara signifikan, yang mencerminkan peran sinergis dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dalam memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan temuan tersebut Himo, Rotinsulu, & Tolosang (2022) dalam studi mereka di empat kabupaten Provinsi Maluku Utara (2010–2019) menegaskan adanya hubungan negatif yang signifikan antara IPM dan TPT, mengindikasikan bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia efektif mereduksi kesenjangan keterampilan di pasar tenaga kerja. Lebih lanjut Potabuga, Rorong, & Siwu (2024) menemukan bahwa peningkatan IPM di Kabupaten Minahasa Selatan secara signifikan menurunkan angka pengangguran terbuka, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa perbaikan indikator kualitas hidup dapat menstimulasi perluasan akses kerja.

Secara konseptual, hubungan negatif antara Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka dijustifikasi melalui tiga mekanisme utama. Pertama, komponen pendidikan dalam IPM meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sehingga mengurangi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kompetensi pekerja dan kebutuhan industri. Kedua, indikator kesehatan yang lebih baik menurunkan hari tidak produktif akibat gangguan kesehatan dan memperpanjang masa partisipasi dalam angkatan kerja. Ketiga, kenaikan standar hidup mendorong pertumbuhan permintaan agregat, yang pada gilirannya memicu peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja baru Sanitra (2021). Oleh karena itu, kebijakan intervensi yang terintegrasi mengoptimalkan aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan IPM merupakan instrumen strategis yang ampuh untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka di berbagai wilayah Indonesia.

2.4.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Upah minimum merupakan batas terendah tingkat upah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan bagi pemberi kerja dalam menentukan besaran gaji atau kompensasi yang diberikan kepada pekerja di suatu perusahaan. Menurut Kaufman dan Hotchkiss (1999), terdapat hubungan antara besaran upah dan tingkat pengangguran, di mana peningkatan upah yang ditetapkan pemerintah cenderung berimplikasi pada penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap.

Sebaliknya, apabila upah minimum di suatu wilayah ditetapkan terlalu rendah, kondisi tersebut juga dapat memicu meningkatnya tingkat pengangguran. Dari sudut pandang pengusaha, kenaikan upah akan diikuti oleh meningkatnya biaya produksi, sehingga untuk menekan pengeluaran, perusahaan dapat mengambil langkah efisiensi berupa pengurangan jumlah tenaga kerja (Rosalia, 2022).

Dalam pandangan Malthus yang mewakili aliran klasik, analisis ekonomi lebih menekankan pada sisi penawaran (*supplyside economies*), sebuah pendekatan yang kembali memperoleh perhatian dalam perkembangan ekonomi modern. Upah dipandang sebagai harga dari penggunaan tenaga kerja dan besarnya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja itu sendiri. Sumber utama pasokan tenaga kerja berasal dari populasi yang berada dalam usia produktif. Kenaikan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya pasokan tenaga kerja, yang berpotensi menekan tingkat upah. Sebaliknya, jika jumlah penduduk menurun, pasokan tenaga kerja berkurang sehingga upah cenderung naik. Atas dasar ini, upaya untuk menaikkan upah dinilai tidak memberikan manfaat dalam jangka panjang, karena peningkatan upah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kecenderungan untuk memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar. Pertambahan penduduk tersebut pada akhirnya kembali menambah penawaran tenaga kerja dan menekan upah ke tingkat sebelumnya. Sebaliknya, penurunan upah dapat menurunkan tingkat kesejahteraan, mendorong masyarakat untuk mengurangi pengeluaran, serta membatasi jumlah anak, sehingga pertumbuhan penduduk melambat. Situasi tersebut selanjutnya akan mengurangi pasokan tenaga kerja dan mendorong kenaikan upah kembali ke posisi semula. Dengan demikian, dalam jangka panjang, tingkat upah akan mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika jumlah penduduk dan pada akhirnya cenderung kembali ke titik keseimbangan awal (Priyono & Ismail, 2012).

2.5 Penelitian Terkait

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan komponen esensial dalam penyusunan karya ilmiah, karena berfungsi sebagai landasan konseptual sekaligus pembanding bagi penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah studi yang relevan dengan topik pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal fokus pembahasan, khususnya terkait variabel pembangunan manusia dan ketenagakerjaan. Meskipun demikian, terdapat pula perbedaan yang cukup signifikan, baik dari segi variabel yang digunakan, lokasi penelitian, periode waktu analisis, maupun objek yang dikaji. Variasi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*)

yang dapat menjadi dasar pengembangan studi ini. Beberapa persamaan dan perbedaan penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Penelitian Terkait

No.	Nama Dan Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Saputra Dkk (2024) Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Mataram Tahun 2008-2022	Metode regresi linier berganda	variabel upah minimum regional berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka	Meneliti Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti Variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka, lokasi penelitian di Provinsi Aceh, metode penelitiannya analisis regresi data panel
2.	Salsabila Dkk (2024) Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Periode 2018-2022	Metode regresi data panel	variabel upah minimum regional berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur.	Meneliti Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti Variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka, lokasi penelitian di Provinsi Aceh
3.	Anggraini Dkk (2023) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jambi Selama Tahun 2017-2021	Metode analisis data panel	Variabel indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi	Meneliti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti Variabel Upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka, lokasi penelitian di Provinsi Aceh
4.	Sahara (2023) Pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Sumatera Barat	Metode Ordinary Least Square (OLS)	variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka	Meneliti Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti Variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka, lokasi penelitian di Provinsi Aceh, metode penelitiannya analisis regresi data panel

5.	Himo Dkk (2022) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di 4 Kabupaten Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019	Metode regresi data panel	Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.	Meneliti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti Variabel Upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka, lokasi penelitian di Provinsi Aceh
6.	Hadi Dkk (2022) Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Pulau Jawa Tahun 2016-2020	Metode analisis data panel	variabel Indeks pembangunan manusia berpengaruh sedangkan variabel upah minimum provinsi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka	Meneliti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Lokasi penelitian di Provinsi Aceh
7.	Yuniarti & Imaningsih (2022) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Sidoarjo	Metode regresi linier berganda	Variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sidoarjo.	Meneliti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti Variabel Upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka, lokasi penelitian di Provinsi Aceh, metode penelitiannya analisis regresi data panel
8.	Siahaan Dkk (2022) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Utara	Metode analisis regresi linier berganda	Hubungan yang negatif indeks pembangunan manusia dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran yang berarti bahwa ketika kedua variabel yang dibahas naik, justru tingkat pengangguran terbuka akan berkurang.	Meneliti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Meneliti Variabel Upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka, lokasi penelitian di Provinsi Aceh, metode penelitiannya analisis regresi data panel

9.	Marliana (2022) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia	Metode regresi linier berganda	Variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan sedangkan variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka	Meneliti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	Lokasi penelitian di Provinsi Aceh, metode penelitiannya analisis regresi data panel
10.	Garnella Dkk (2020) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh	Metode regresi data panel	Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh.	Meneliti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh	Meneliti variabel Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Sumber: Data diolah (2026)

2.6 Kerangka Berpikir

Menurut landasan teori pada penelitian ini pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi sebagai variabel X_1 dan X_2, secara signifikan akan memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel Y baik secara parsial maupun simultan untuk memperjelas pernyataan di atas maka kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

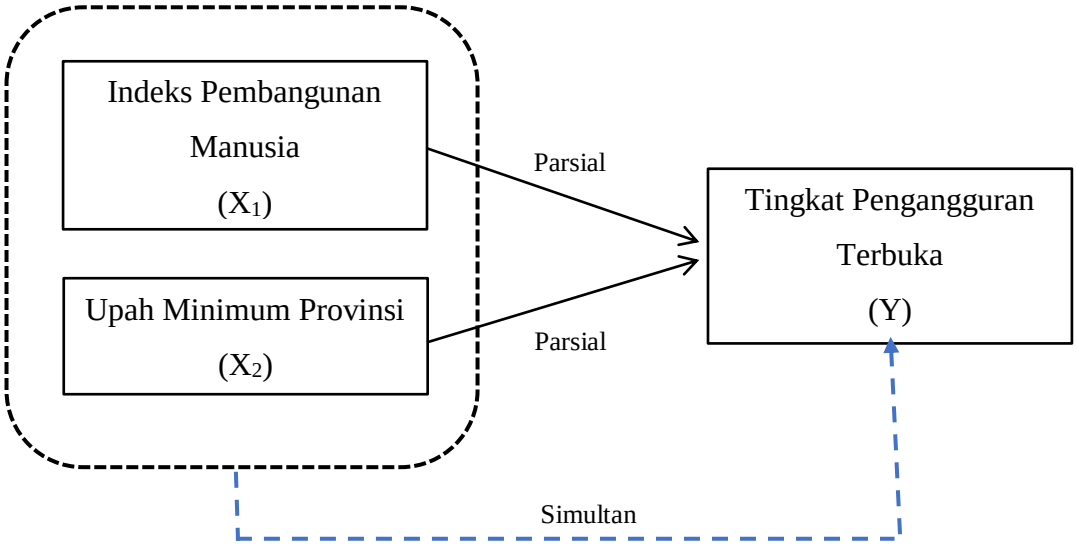

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Ho_1 : Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

Ha_1 : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

Ho_2 : Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

Ha_2 : Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

Ho_3 : Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

Ha_3 : Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipahami sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel secara objektif dan analisis data berbasis angka. Metode ini diterapkan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik guna mengidentifikasi hubungan antarvariabel yang diteliti. Dengan demikian, tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya secara empiris dan sistematis (Sugiono, 2021).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk regresi data panel yang menggabungkan data *time series* dan data *cross-sectional*. Sumber data yang dipakai ialah:

1. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017-2024 yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.
2. Upah Minimum Provinsi tahun 2017-2024 yang didapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017-2024 yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

3.3 Sampel Penelitian

Sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada 23 kabupaten/kota selama periode 2017-2024 (8 Tahun).

3.4 Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis variabel, seperti di bawah ini:

1. Variabel Terikat (*Dependen*)

   Variabel terikat (*Dependen*) pada penelitian ini ialah Tingkat Pengangguran Terbuka (Y).

2. Variabel Bebas (*Independen*)

   Variabel bebas (*Independen*) pada penelitian ini ialah Indeks Pembangunan Manusia (X1) dan Upah Minimum Provinsi (X2).

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan klasifikasi variabel yang telah di uraikan di atas, berikut ini tabel penjelasan pengertian operasional variabel, yaitu:

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Sumber Data	Satuan Data
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)	Persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan dalam periode tertentu pada 2017-2024.	Badan Pusat Statistk (BPS) Provinsi Aceh	Persen
2.	Indeks Pembangunan Manusia (X_1)	Ukuran komposit yang digunakan untuk menilai pembangunan manusia di suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama pada 2017-2024.	Badan Pusat Statistk (BPS) Provinsi Aceh	Poin
3.	Upah Minimum Provinsi (X_2)	Standar upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur di Provinsi Aceh pada tahun 2017-2024.	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Rupiah

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di pakai untuk penelitian ini merupakan regresi data panel (*panel least square*). Metode data panel ini dipakai untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan dengan mempertimbangkan perbedaan antar individu dan waktu, serta dapat memberikan informasi yang

lebih banyak dan bervariasi dibandingkan dengan data *cross section* atau *time series* saja. Bentuk umum persamaan model regresi data panel ialah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \ldots + \beta_n X_n + \varepsilon_{it} \quad \text{.....} \quad (3.1)$$

Keterangan:

α = Konstanta

β = Koefisien

Y = Variabel terikat (Dependen)

X = Variabel bebas (Independen)

Ɛ = *error term* (error)

i = *cross section* (Kabupaten/Kota)

t = *time series* (tahun)

Berdasarkan persamaan 3.1 maka penelitian akan menganalisa pengaruh dari variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka, maka untuk persamaannya ialah:

$$TPT_{it} = \alpha + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 LogUMP_{it} + e_{it} \quad \text{.....} \quad (3.2)$$

Keterangan:

α = Konstanta

β_n = Koefisien

TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi i tahun t

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi i tahun t

$LogUMP_{it}$ = Logaritma Upah Minimum Provinsi di Provinsi i tahun t

e = *error term*

i = *Cross Section* (Provinsi)

t = *Time Series* (tahun)

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan model regresi data panel. Model ini dapat diestimasi dengan tiga pendekatan, yaitu CEM, FEM, dan REM.

1. *Common Effect Model* (CEM)

Model ini ialah Teknik analisis data yang sangat simpel untuk mengestimasi data panel, karena mengkombinasi data *time series* dan data *cross section* dengan menggunakan metode *ordinary least square* (OLS). Pendekatan ini tidak berfokus pada dimensi individu ataupun waktu, dan diasumsikan bahwa data perilaku antar individu sama pada berbagai jangka waktu, maka untuk persamaannya adalah:

$$\boldsymbol{TPT_{it} = \alpha + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 LogUMP_{it} + e_{it}} \quad \textbf{(3.3)}$$

Keterangan:

α = Konstanta

β_n = Koefisien

TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi i tahun t

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi i tahun t

$LogUMP_{it}$ = Logaritma Upah Minimum Provinsi di Provinsi i tahun t

e = *error term*

i = *Cross Section* (Provinsi)

t = *Time Series* (tahun)

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini ialah teknik yang mempunyai efek individu yang berbeda dengan menggunakan metode model efek tetap (*Fixed Effect Model*)/ *least squares dummy variabel* (LSDV) atau sering dikatakan variabel dummy. Pendekatan ini diasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep antar objek tetapi intersep antar waktu ialah sama, maka untuk persamaannya ialah:

$$\boldsymbol{TPT_{it} = \alpha + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 LogUMP_{it} + e_{it}} \quad \textbf{(3.4)}$$

Keterangan:

α = Konstanta

β_n = Koefisien

TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi i tahun t

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi i tahun t

$LogUMP_{it}$ = Logaritma Upah Minimum Provinsi di Provinsi i tahun t

e = *error term*

i = *Cross Section* (Provinsi)

t = *Time Series* (tahun)

3. *Random Effect Model* (REM)

Model yang tekniknya menggunakan tambahan variabel gangguan yang bisa saja akan saling menghubungkan antar individu serta waktu. Pendekatan ini diasumsikan bahwa perbedaan intersep antar objek dan waktu mungkin akan dimasukkan ke dalam error, karena itu model ini sering dikatakan model komponen error/*Error Component Model* (ECM). Model ini memakai metode *Generalized Least Square* (GLS), maka persamaannya ialah:

$$\boldsymbol{TPT_{it} = \alpha + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 LogUMP_{it} + e_{it}} \quad \textbf{(3.5)}$$

Keterangan:

α = Konstanta

β_n = Koefisien

TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi i tahun t

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi i tahun t

$LogUMP_{it}$ = Logaritma Upah Minimum Provinsi di Provinsi i tahun t

e = *error term*

i = *Cross Section* (Provinsi)

t = *Time Series* (tahun)

3.8 Pemilihan Uji Regresi Data Panel

Uji regresi data panel dapat diolah menggunakan tiga langkah, yaitu:

1. Uji Chow/*Likelihood Ratio*

Uji ini digunakan untuk mengetahui model terbaik antar CEM dengan FEM. Maka hipotesisnya adalah:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Jika nilai Prob. > α (0.05) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, jadi model yang dipilih adalah *Common Effect* (CEM). Sebaliknya, jika nilai Prob. < α (0,05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, jadi model yang dipilih ialah *Fixed Effect* (FEM).

2. Uji Hausman/*Hausman Test*

Uji ini dipakai untuk mengetahui model yang terbaik antara REM dengan FEM. Maka hipotesisnya adalah:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Jika nilai Prob. > α (0,05) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, jadi model yang dipilih adalah *Random Effect* (REM). Sebaliknya, jika nilai Prob. < α (0,05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, jadi model yang dipilih adalah *Fixed Effect* (FEM).

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)/*Lagrange Multiplier Test*

Uji ini digunakan untuk mengetahui model terbaik antar CEM dengan REM. Maka hipotesisnya adalah:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Jika nilai Prob. > α (0,05) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, jadi model yang dipilih ialah *Common Effect* (CEM). Sebaliknya, jika nilai prob. < α (0,05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, jadi model yang dipilih adalah *Random Effect* (REM).

3.9 Pengujian Hipotesis Penelitian

جامعة الرانري

Pada pengujian hipotesis ini terdapat tiga metode yang dapat digunakan, yaitu:

1. Uji T (Parsial)

Uji ini dipakai untuk menganalisa berapa besar pengaruh variabel bebas/independent terhadap variabel terikat/dependent dengan cara parsial dan mengibaratkan variabel lainnya itu konstan/tetap, maka hipotesisnya ialah:

H_o: β_1, β_2 = Tidak berpengaruh (Signifikan)

H_a: β_1, β_2 = Berpengaruh (Signifikan)

Jika nilai prob. T-statistik < α (0,05), maka variabel bebas/independent berpengaruh (signifikan) terhadap variabel terikat/dependent. Sebaliknya jika nilai prob. T-statistik > α (0,05), maka variabel bebas tidak berpengaruh (signifikan) terhadap variabel terikat/ dependent.

2. Uji F (Simultan)

Uji ini digunakan untuk menganalisa berapa besar pengaruh dari variabel bebas/independent mempengaruhi variabel terikat/dependent dengan cara simultan atau bersama-sama, maka hipotesisnya ialah:

H_o: β_1, β_2 = Tidak berpengaruh (Signifikan)

H_a: β_1, β_2 = Berpengaruh (Signifikan)

Jika nilai prob. F-statistik < α (0,05), maka variabel bebas/independent berpengaruh (signifikan) terhadap variabel terikat/dependent. Sebaliknya jika nilai prob. F-statistik > α (0,05), maka variabel bebas/independent tidak berpengaruh (signifikan) terhadap variabel terikat/dependent.

3. R Square (R^2)

Uji ini dipakai untuk mengira seberapa besar variabel bebas/independent mampu mempengaruhi variabel terikat/dependent dengan cara menyeluruh. Nilai R Square (R^2) ialah antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$).

Jika nilai R^2 mendekati ke 0, maka variabel bebas/independent berpengaruh secara tidak menyeluruh (lemah atau sangat lemah) terhadap variabel terikat/dependent. Sebaliknya jika nilai R^2 mendekati ke 1, maka variabel bebas/independent berpengaruh secara menyeluruh (kuat atau sangat kuat) terhadap variabel terikat/dependent.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Aceh adalah wilayah yang terletak di bagian paling barat Indonesia, tepatnya di ujung utara Pulau Sumatera. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, luas wilayah Provinsi Aceh tercatat sebesar 57.956 km² atau sekitar 3,02% dari total luas wilayah Indonesia. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Aceh diperkirakan mencapai kurang lebih 5,55 juta jiwa. Secara administratif, wilayah ini terbagi ke dalam 23 daerah otonom yang terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota. Selain itu, terdapat 290 kecamatan serta 6.497 gampong (desa) yang menjadi unit pemerintahan terkecil di daerah tersebut.

Gambar 4.1
Peta Lokasi Penelitian

Sumber: BPS (2026)

Aceh merupakan wilayah yang terletak di bagian paling barat Pulau Sumatra sekaligus ujung barat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik terluar Indonesia berada di Pulau Rondo, sementara titik Kilometer Nol Indonesia terletak di Pulau Weh. Secara geografis, Provinsi Aceh berada di antara 2° hingga 6° Lintang Utara dan 95° hingga 98° Lintang Selatan, dengan ketinggian

rata-rata sekitar 125 meter di atas permukaan laut. Batas administratif Provinsi Aceh meliputi wilayah utara dan timur yang berbatasan dengan Selat Malaka, bagian selatan yang berbatasan darat dengan Provinsi Sumatera Utara, serta wilayah barat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki struktur perekonomian yang masih didominasi oleh sektor primer, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dalam konteks ketenagakerjaan, sektor tersebut menjadi lapangan usaha yang paling besar dalam menyerap tenaga kerja di Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2024, sektor pertanian menyerap sekitar 38,07 persen tenaga kerja, sehingga menjadi sektor utama dalam menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja, diikuti oleh sektor industri pengolahan. Tingginya kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh karakteristik wilayah Aceh yang masih memiliki basis ekonomi agraris, luasnya lahan pertanian, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas perkebunan, perikanan, dan usaha pertanian tradisional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Aceh sekaligus berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut.

4.2 Analisis Statsitik Deskriptif

Analisis ini dimaksudkan untuk menyajikan deskripsi awal mengenai variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian. Melalui proses pengolahan data, diperoleh nilai-nilai statistik deskriptif yang merangkum karakteristik dari masing-masing variabel. Dengan menggunakan hasil statistik deskriptif dari ketiga variabel tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman awal mengenai sifat dan sebaran data, yang pada akhirnya mendukung pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Analisis Statistik Deskriptif

	TPT (Persen)	**IPM (Poin)**	**UMP (Rupiah)**
Mean	5,77	71,51	3069820
Median	5,84	70,72	3165031
Maximum	12,51	87,17	3660898
Minimum	1,03	62,88	2500000
Std. Dev.	2,27	4,65	319213,6
Observations	184	184	184

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.1 yang mencakup 184 observations, kita dapat melihat beberapa statistik deskriptif mengenai ketiga variabel penelitian ini, yaitu untuk TPT nilai rata-rata (mean) sebesar 5,77 dengan nilai maximum sebesar 12,51 dari Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 dan minimum 1,03 dari Bener Meriah tahun 2019, serta standar deviasi mencapai 2,27 berarti sebaran data TPT cukup tinggi disebabkan perbedaan struktur ekonomi daerah**,** keterbatasan kesempatan kerja**,** ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Kemudian variabel IPM untuk nilai rata-rata (mean) sebesar 71,51 dengan nilai maximum sebesar 87,17 dari Kota Banda Aceh tahun 2024 dan minimum sebesar 62,88 dari Kota Subulussalam tahun 2017, serta standar deviasi mencapai 4,65 berarti sebaran data IPM merata disebabkan pencapaian pembangunan manusia relatif seragam di seluruh Aceh. Selanjutnya untuk Upah Minimum Provinsi nilai rata-rata (mean) sebesar 3069820 dengan nilai maximum sebesar 3660898 dari Kota Banda Aceh tahun 2024 dan minimum 2500000 dari 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh pada tahun 2017, Serta standar deviasi yang mencapai 319213,6 menunjukkan bahwa distribusi data Upah Minimum Provinsi berada dalam kategori sedang. Ini menunjukkan bahwa perbedaan UMP antar wilayah atau waktu dalam data tersebut tidak terlalu jauh, meskipun tetap ada variasi..

4.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan suatu kondisi ketika individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini sering kali menjadi beban ekonomi bagi rumah tangga.

Timbulnya pengangguran terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, faktor internal, yaitu situasi ketika individu atau kelompok tidak memperoleh pekerjaan meskipun telah melakukan upaya pencarian kerja, termasuk adanya kecenderungan rendahnya motivasi untuk bekerja. Kedua, faktor eksternal, yakni kondisi di mana jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada, sehingga menciptakan ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja Faktor lainnya berkaitan dengan perlambatan aktivitas ekonomi yang dipicu oleh perkembangan teknologi, yang mendorong efisiensi dan berimplikasi pada pengurangan kebutuhan tenaga kerja. Oleh sebab itu, pengangguran dapat dipandang sebagai permasalahan ekonomi yang berdampak negatif, sehingga memerlukan upaya penanganan yang berkelanjutan dan terarah (Yudhistiara , 2022).

Gambar 4.2

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh

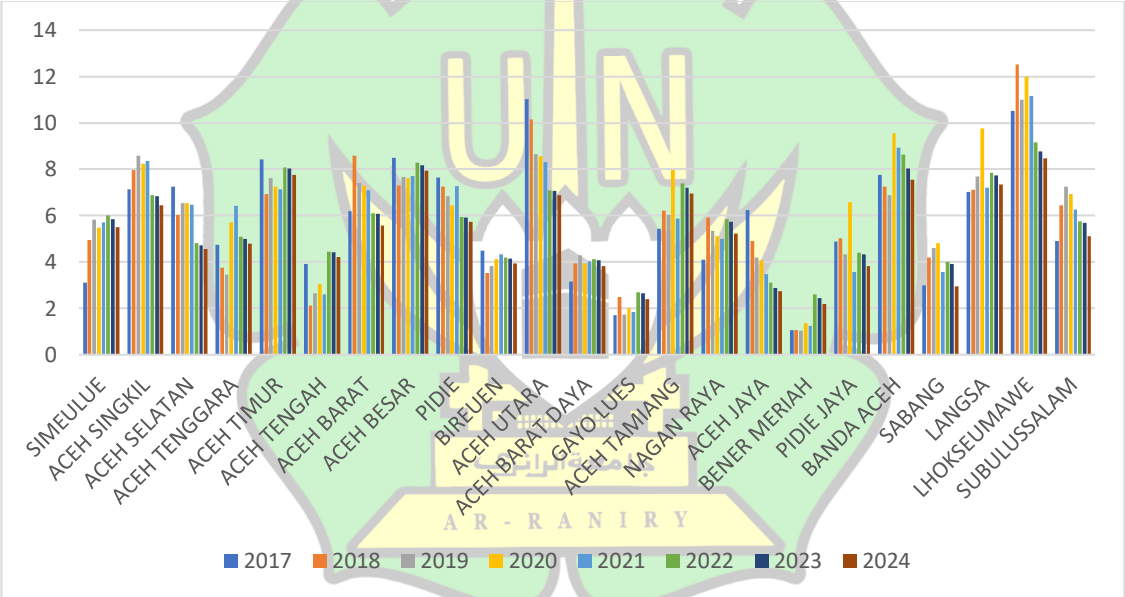

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (2026)

Berdasarkan Gambar 4.2 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh selama periode 2017–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi, ditandai dengan adanya kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Persentase tertinggi tercatat di Kota Lhokseumawe pada tahun 2018, yaitu sebesar 12,51 persen, oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, tingginya jumlah lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang tidak terserap pasar kerja, keterbatasan perkembangan sektor industri, serta adanya arus urbanisasi yang meningkatkan jumlah pencari kerja di wilayah tersebut (Badan Pusat Statistik, 2024). Sedangkan yang terendah terdapat di Bener Meriah tahun 2019 sebesar 1,03 persen, dikarenakan oleh

dominasi sektor pertanian yang mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja, termasuk dalam sektor informal. Selain itu, rendahnya arus urbanisasi dan jumlah pencari kerja formal membuat tekanan di pasar kerja relatif kecil, sehingga tingkat pengangguran terbuka menjadi rendah (Badan Pusat Statistik, 2024).

4.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator komposit yang digunakan untuk menilai tingkat capaian pembangunan dengan mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Pada aspek sosial, penilaian dilakukan melalui indikator pendidikan dan kesehatan, sedangkan pada aspek ekonomi diukur berdasarkan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan. Integrasi kedua dimensi tersebut menjadikan IPM mampu merepresentasikan kondisi pembangunan secara lebih komprehensif dan mendekati realitas yang sebenarnya (Adam , 2021).

Gambar 4.3

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh

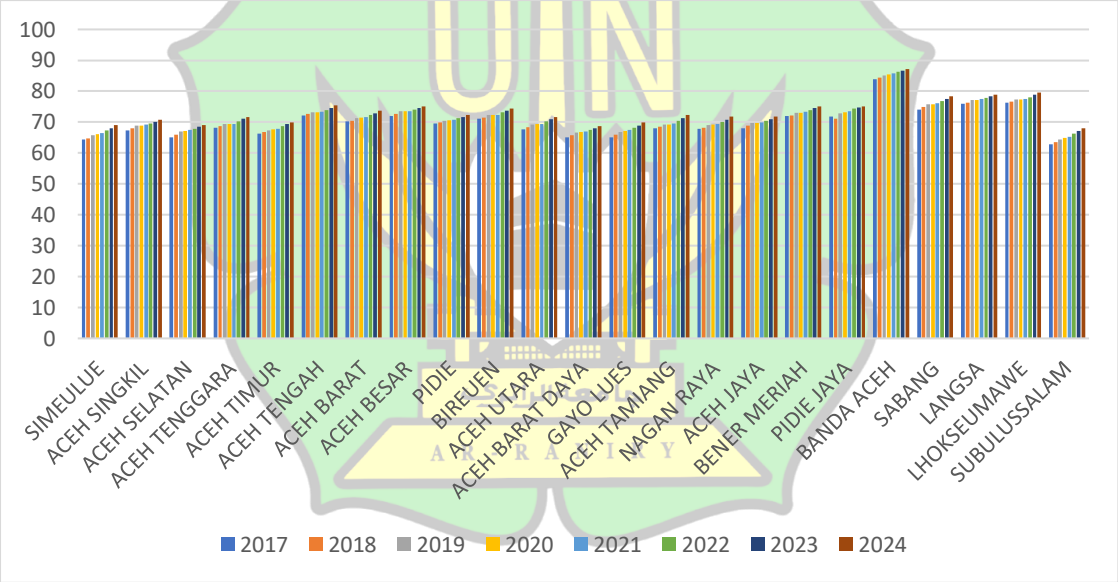

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (2026)

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa perkembangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh pada tahun 2017-2024 mengalami peningkatan. Indeks (nilai) yang tertinggi terdapat di Kota Banda Aceh tahun 2024 sebesar 87,17 poin, oleh kenaikan pada semua dimensi pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Kota Banda Aceh memiliki capaian tinggi pada rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, serta pengeluaran per kapita, sehingga mampu menjadi daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Aceh. Sedangkan yang terendah terdapat di Subulussalam tahun 2017 sebesar 62,88 poin, yang oleh masih rendahnya

capaian pada dimensi pembentuk IPM, yaitu kesehatan pendidikan, serta standar hidup layak. yang mencerminkan keterbatasan akses pendidikan, rendahnya kualitas kesehatan, serta tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah dibandingkan daerah lain . Kondisi ini menyebabkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut tertinggal dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh (Badan Pusat Statistik, 2024).

4.2.3 Upah Minimum Provinsi

Upah termasuk kedalam salah satu elemen kunci yang memengaruhi jumlah tenaga kerja yang tersedia dan berperan besar dalam tingkat penerimaan pekerja. Besaran upah yang ditentukan oleh perusahaan umumnya dipengaruhi oleh produktivitas, kualitas tenaga kerja, dan jumlah jam kerja secara keseluruhan. Pergerakan upah di Provinsi Aceh menunjukkan pola peningkatan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Peningkatan upah yang konsisten ini dapat berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Tahir, 2018).

Penetapan upah memiliki dampak positif dari sisi penawaran tenaga kerja karena tingkat upah yang lebih tinggi cenderung mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam pasar kerja, sehingga berpotensi mengurangi pengangguran. Namun, dari perspektif permintaan tenaga kerja, kebijakan ini dapat memiliki dampak negatif, karena upah tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memberatkan perusahaan dan mengakibatkan berkurangnya jumlah pekerja yang diserap di suatu wilayah (Sahara & Iryani, 2023).

Gambar 4.4

Perkembangan Upah Minimum Provinsi Aceh

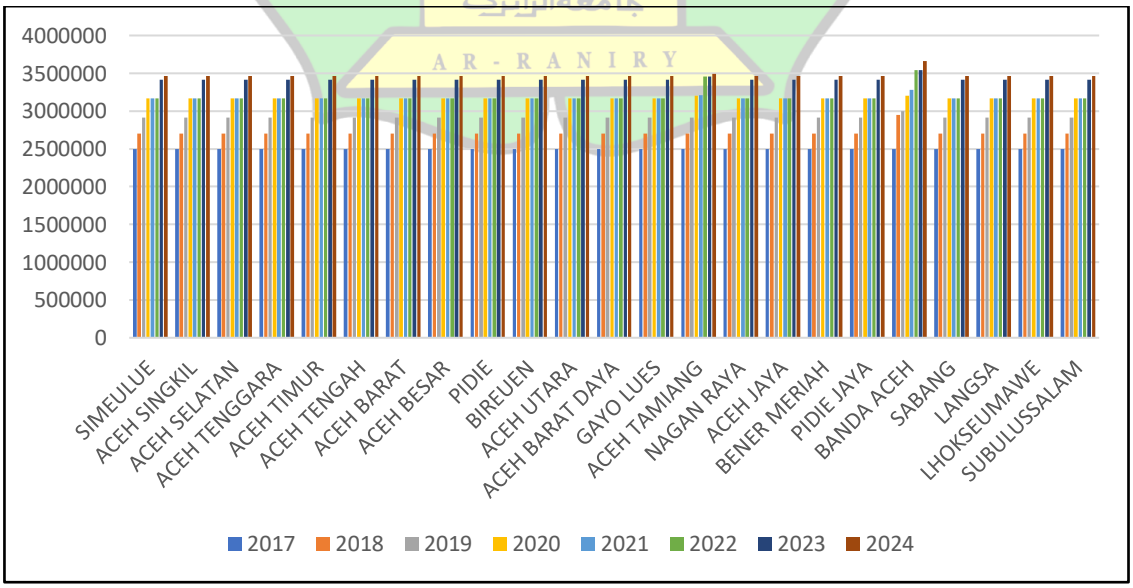

Sumber: DISNAKERMOBDUK (2026)

Menurut Gambar 4.3, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, Upah Minimum Provinsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai upah tertinggi tercatat di Kota Banda Aceh pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp3.660.898. Kondisi ini terjadi karena Banda Aceh memiliki dewan pengupahan daerah yang berwenang mengusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih tinggi, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah serta biaya hidup yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sementara itu, sebagian besar kabupaten di Aceh tetap menggunakan UMP karena belum menetapkan UMK sendiri (Disnakermobduk, 2024). Sedangkan yang terendah di 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh pada tahun 2017 sebesar 2.500.000 rupiah, karena sebagian besar kabupaten tidak mengajukan penetapan UMK dan otomatis mengikuti UMP Aceh, sedangkan Banda Aceh pada tahun 2018 mulai mengusulkan UMK yang lebih tinggi berdasarkan pertimbangan biaya hidup dan kondisi ekonomi kota. Penetapan UMK memang mensyaratkan rekomendasi dewan pengupahan daerah dan hanya berlaku jika diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga daerah yang tidak mengajukan tetap menggunakan UMP yang nilainya lebih rendah (Disnakermobduk, 2024).F

4.3 Analisis Penelitian Model Regresi Data Panel

Penelitian ini menerapkan model regresi data panel guna mengkaji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh. Dalam analisis data panel terdapat tiga pendekatan estimasi yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk memperoleh model yang paling sesuai dan optimal, dilakukan serangkaian pengujian, yaitu uji Chow (*Chow-test*), uji Hausman (*Hausman-test*), serta uji Lagrange Multiplier (LM-*test*).

Tabel 4.2

Hasil Uji Chow (*Chow-test*) dan Uji Hausman (*Hausman-test*)

Chow-test	***Statistic***	***P-value***
Cross-section F	47,313	0,000
Cross-section Chi-square	371,878	0,000
Hausman-test	***Statistic***	***P-value***
Cross-section random	9,316	0,009

Sumber: Data diolah (2026)

4.3.1 Uji Chow (*Chow-Test*)

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Apabila hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka model yang dipilih adalah *Common Effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect*. Berdasarkan Tabel 4.2 menyajikan hasil uji Chow yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0,000, lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan (α = 5% atau 0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan dibandingkan model *Common Effect*.

4.3.2 Uji Hausman (*Hausman-Test*)

Uji ini digunakan untuk menentukan model estimasi yang lebih tepat digunakan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Apabila nilai probabilitas dari *cross-section random* kurang dari 0,05, maka model yang lebih sesuai digunakan adalah *Fixed Effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, maka model yang digunakan adalah *Random Effect*. Berdasarkan Tabel 4.2 menyajikan hasil uji Hausman, di mana nilai probabilitas cross-section random sebesar 0,009, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan (α = 5%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih sesuai digunakan dibandingkan model *Random Effect*.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan rangkaian pengujian yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah membangun model regresi, baik pada regresi linier berganda maupun model regresi data panel, yang bertujuan untuk memastikan model yang dibangun telah memenuhi asumsi-asumsi dasar yang dipersyaratkan. Pemenuhan asumsi-asumsi tersebut penting agar hasil estimasi yang diperoleh bersifat valid dan efisien. Apabila asumsi dasar dilanggar, maka koefisien regresi yang dihasilkan dapat mengalami bias dan tidak lagi memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Dalam konteks regresi data panel, pengujian asumsi klasik yangumumnya dianggap relevan untuk dilakukan meliputi uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas (Basuki, 2021).

4.4.1 Uji Multikolineritas

Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi, yang berpotensi menyebabkan bias dan menghasilkan estimasi yang tidak akurat. Apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen berada di bawah 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami permasalahan multikolinearitas.

Sebaliknya, jika nilai koefisien korelasi melebihi 0,80, maka terdapat indikasi adanya multikolinearitas dalam model. Adapun hasil dari pengolahan data tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinearitas

	IPM (X_1)	**LOGUMP (X_2)**
IPM (X_1)	1,000000	0,286275
LOGUMP (X_2)	0,286275	1,000000

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 4.4 menyajikan hasil uji multikolinearitas, dimana nilai koefisien korelasi Indeks Pembangunan Manusia (X_1) dan Upah Minimum Provinsi (X_2) adalah 0,286275 yang lebih kecil dari batas 0,80, maka variabel independen ini terbebas dari multikolinearitas.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi adanya perbedaan varian dari residual antar satu pengamatan dengan pengamatan lainnya, yang dikenal sebagai gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model tidak mengalami heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas. Hasil dari pengolahan data terkait uji ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	***P-value***
C	0,007
IPM (X_1)	0,647
UMP (X_2)	0,172

Sumber: Data diolah (2026)

Tabel 4.5 menyajikan hasil uji heteroskedastisitas, dimana nilai P-value Indeks Pembangunan Manusia (X_1) yaitu 0,647 lebih besar dari 0,05 dan Upah Minimum Provinsi (X_2)

adalah 0,172 juga lebih besar dari 0,05, maka variabel-variabel independen ini tidak terjadi heteroskedastisitas tetapi homoskedastisitas.

4.5 Model Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel melalui dua tahap pengujian, yaitu uji *Chow* dan *uji Hausman*, diperoleh bahwa model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pengolahan data dengan menggunakan pendekatan FEM selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Hasil Estimasi Data Panel Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	***Coefficient***	***t-Statistic***	***P-value***
C	7,6216	1,5352	0,1267
IPM (X_1)	-0,3808	-2,7474	0,0067
LOGUMP (X_2)	3,1646	2,0714	0,0399
F-statistic		46,9634	
P-value (F-statistic)		0,0000	
R-squared		0,8763	
Adjusted R-squared		0,8577	

Sumber: Data diolah (2026)

Model regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\mathbf{TPT = 7,6216 - 0,3808IPM + 3,1646LOGUMP + \varepsilon}$$

Keterangan :

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

LOGUMP : Logaritma Upah Minimum Provinsi

ε : Error

Berdasarkan hasil estimasi model regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) yang disajikan pada Tabel 4.6, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta sebesar 7,6216 mengindikasikan bahwa apabila kedua variabel independen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (X_1) dan Upah Minimum Provinsi (X_2), diasumsikan tidak memiliki pengaruh (bernilai nol), maka nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh selama periode 2017-2024 diperkirakan sebesar 7,6216.
b. Koefisien regresi untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_1) sebesar -0,3808 mengindikasikan adanya hubungan negatif antara Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat pengangguran terbuka. Artinya, setiap peningkatan satu poin dalam Indeks Pembangunan Manusia akan menyebabkan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,3808, dengan asumsi variabel lain dalam model bersifat konstan/tetap di Provinsi Aceh selama periode 2017-2024.
c. Koefisien regresi pada variabel Upah Minimum Provinsi (X_2) sebesar 3,1646 menunjukkan hubungan yang bersifat positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu persen dalam UMP akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,1646, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan (tetap/konstan) selama periode 2017-2024 di Provinsi Aceh.

4.6 Pengujian Hipotesis Penelitian

4.6.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel independen berkontribusi dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil pada Tabel 4.6, koefisien variabel indeks pembangunan manusia (X_1) tercatat sebesar -0,3808 dengan nilai probabilitas 0,0067, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Aceh selama periode 2017-2024. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan adanya hubungan negatif antara kedua variabel tersebut.

Sementara itu, variabel upah minimum provinsi (X_2) memiliki koefisien sebesar 3,1646 dengan nilai probabilitas 0,0399, yang berada di bawah tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh dalam rentang waktu 2017-2024. Nilai koefisien yang positif mengindikasikan adanya hubungan positif antara kedua variabel tersebut.

4.6.2 Uji Simultan (Uji-f)

Uji simultan dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana pengaruh keseluruhan variabel independen, yakni indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi, terhadap variabel dependen berupa tingkat pengangguran terbuka. Pengujian dilakukan melalui Uji-f dengan memperhatikan nilai probabilitas *F-statistik* pada tingkat signifikansi α = 0,05. Jika nilai probabilitas *F-statistik* lebih kecil dari α, maka seluruh variabel independen dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari α, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan data pada Tabel 4.6, nilai *F-statistik* dari model *Fixed Effect Model* adalah sebesar 46,9634 dengan probabilitas 0.0000, yang berarti lebih kecil dari α = 0,05. Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa indeks pembangunan manusia (X_1) dan upah minimum provinsi (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Aceh selama periode 2017-2024.

4.6.3 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R^2) merepresentasikan proporsi variasi pada variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia (X_1) dan upah minimum provinsi (X_2). Berdasarkan Tabel 4.6, nilai estimasi R^2 pada model *Fixed Effect* adalah sebesar 0,8763. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 87,63% variasi yang terjadi pada tingkat pengangguran terbuka dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Adapun sisanya, yaitu sebesar 12,37%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dicakup dalam penelitian ini.

4.7 Pembahasan dan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, variabel indeks pembangunan manusia memiliki koefisien sebesar -0,3808 yang mengindikasikan adanya hubungan negatif dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. Nilai probabilitas sebesar 0,0067 lebih kecil daripada tingkat signifikansi α = 0,05, menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hal ini menegaskan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia cenderung berdampak pada penurunan jumlah

pengangguran terbuka. Indeks Pembangunan Manusia memiliki komponen utama yang berkaitan dengan harapan hidup, kesehatan, akses terhadap pendidikan, serta pemenuhan standar hidup yang layak. Apabila tenaga kerja memiliki kondisi kesehatan yang baik, tingkat pendidikan yang tinggi, dan kualitas hidup yang memadai, maka produktivitas serta kualitas output pekerjaan yang dihasilkan cenderung lebih optimal. Sebaliknya, apabila ketiga aspek tersebut berada pada kondisi yang rendah, maka kualitas hasil kerja juga berpotensi menurun. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai kualitas serta daya serap Sumber Daya Manusia (SDM) di pasar kerja. Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Manusia, maka kualitas tenaga kerja cenderung meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong penurunan tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Hadi, Riani, & Haryatiningsih (2022) yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai IPM, maka tingkat pengangguran cenderung mengalami penurunan di suatu wilayah. Peningkatan IPM dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti perbaikan kondisi kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta meningkatnya daya beli masyarakat. Ketika faktor-faktor tersebut terus mengalami perkembangan yang positif, maka kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat secara relatif baik. Peningkatan kualitas dan kapabilitas penduduk inilah yang pada akhirnya berkontribusi dalam menekan jumlah pengangguran. Temuan yang sejalan juga dikemukakan oleh Soeharjoto & Oktavia (2021) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Keseragaman hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia secara langsung diikuti oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran di Indonesia, sedangkan penurunan IPM berpotensi mendorong meningkatnya pengangguran. Kondisi ini sejalan dengan teori pertumbuhan baru (*new growth theory*) yang menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam indikator IPM memiliki peran penting dalam memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja, termasuk tingkat pengangguran.

Menurut teori pertumbuhan baru (*new growth theory*), peran pemerintah menjadi krusial dalam mendorong pembangunan modal manusia (*human capital*) serta inovasi guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Investasi pada sektor pendidikan diharapkan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu. Semakin tinggi kualitas manusia, maka kapasitas keilmuan dan keahlian yang dimiliki juga akan

semakin berkembang, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. perusahaan cenderung memperoleh output yang lebih besar ketika mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat produktivitas tinggi. Kondisi ini mendorong peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja yang berkualitas, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi lebih luas dan pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran (Todaro & Smith, 2020). Hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran juga dijelaskan oleh Todaro & Smith (2020), yang menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan utama dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemampuan suatu negara untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi modern, sehingga mampu mengembangkan kapasitas ekonomi dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, kemampuan tenaga kerja dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja juga akan semakin baik. Hal ini pada akhirnya mendorong peningkatan kesempatan kerja, sehingga dapat menekan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, pembangunan manusia yang tercermin melalui tingginya nilai IPM berimplikasi pada menurunnya tingkat pengangguran serta mendukung terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Mahroji & Nurkhasanah, 2019)

4.7.2 Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, variabel Upah Minimum Provinsi memiliki koefisien sebesar 3,1646 yang menunjukkan adanya hubungan positif dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. Nilai probabilitas sebesar 0,0399 lebih kecil daripada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Hal ini menegaskan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum cenderung berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran terbuka. Ketika upah minimum naik, pengangguran cenderung meningkat karena biaya tenaga kerja bagi perusahaan menjadi lebih tinggi, sehingga permintaan akan pekerja berkurang sesuai hukum permintaan-penawaran di pasar tenaga kerja. Perusahaan sering merespons dengan mengurangi perekrutan pekerja baru (terutama pemula atau *low-skilled*), memindahkan produksi ke daerah dengan upah lebih rendah, atau bahkan menutup operasi di wilayah tersebut, yang menyempitkan peluang kerja secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Hadi, Riani, & Haryatiningsih (2022) yang menunjukkan bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Mankiw, 2018), mengenai kekakuan upah. Teori ini menjelaskan bahwa upah tidak selalu mampu

menyesuaikan diri secara fleksibel hingga tercapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketika tingkat upah berada pada level yang relatif tinggi, biaya produksi yang ditanggung perusahaan akan meningkat. Sebagai respons, perusahaan cenderung melakukan efisiensi, salah satunya melalui pengurangan jumlah tenaga kerja. Kondisi tersebut pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya tingkat pengangguran. Temuan yang sejalan juga dikemukakan oleh Salsabila et al. (2024) yang menunjukkan bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan pandangan John Maynard Keynes dalam karyanya The General Theory of Employment, Interest, and Money yang dikembangkan pada masa Depresi Besar. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa tingkat kesempatan kerja dipengaruhi oleh dinamika upah, di mana penurunan tingkat upah dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. dengan demikian, apabila pemerintah menetapkan Upah Minimum pada tingkat yang relatif tinggi, maka hal tersebut berpotensi meningkatkan beban biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sebagai respons, perusahaan cenderung melakukan efisiensi, salah satunya melalui pengurangan jumlah tenaga kerja. Kondisi ini pada akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran akibat berkurangnya kesempatan kerja bagi para pekerja.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan hasil analisis dan pengkajian data perihal pengaruh Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh menggunakan regresi data panel melalui metode *Fixed Effect Model* (FEM), beberapa konklusi dapat dirumuskan menjadi:

1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_1) menunjukkan hubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh.
2. Variabel Upah Minimum Provinsi (X_2) menunjukkan hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh.
3. Secara simultan, variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_1) dan Upah Minimum Provinsi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) di Provinsi Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan hasil analisis serta simpulan yang telah dirumuskan, terdapat sejumlah rekomendasi saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Karena IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, pemerintah disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperluas akses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta mendorong program pelatihan keterampilan (skill development) berbasis kompetensi. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, peluang masyarakat untuk terserap di dunia kerja akan semakin besar sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan.
2. Karena UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan upah minimum. Penetapan UMP sebaiknya mempertimbangkan kondisi produktivitas tenaga kerja, kemampuan dunia usaha, serta situasi ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan Provinsi Aceh untuk sektor yang paling berkontribusi adalah sektor padat karya atau primer (pertanian, kehutanan dan perikanan). Maka dengan itu, pemerintah juga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memberikan insentif bagi pelaku usaha (khususnya UMKM), serta meningkatkan

fleksibilitas pasar tenaga kerja. Dengan demikian, kenaikan upah minimum tidak berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal. Disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain seperti Pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, investasi, Inflasi, dan angkatan kerja yang berpotensi memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, memperluas rentang waktu penelitian juga diharapkan dapat menghasilkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Adam , R. (2021). Analisis Pengaruh PDRB, Belanja Modal, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 34 Provinsi Di IndonesiaTahun 2014-2019. *Skripsi, Universitas Brawijaya*.

Alkhoiriyah, S. F., & Sa'roni, C. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 4 No. 2*, 299-309.

Arfida, B. (2007). *Ekonomi Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Provinsi Aceh Dalam Angka.* Banda Aceh: BPS Aceh.

Badan Pusat Statistik Aceh. (2022). *Provinsi Aceh Dalam Angka.* Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh.

Badan Pusat Statistik Aceh. (2025). *Tingkat Pengangguran Terbuka.* Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh.

Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews).* Yogyakarta: UMY.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. (2025, Juni 1). *Disbudpar Aceh Gelar Pelatihan Ekraf.* Retrieved from Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh: https://disbudpar.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/disbudpar-aceh-gelar-pelatihan-ekraf?utm_source=chatgpt.com

Disnakermobduk, A. (2024). *Upah Minimum Provinsi Aceh.*

Disnakermobduk, A. (2024). *Upah Minimum Provinsi Aceh.* Banda Aceh: Disnakermobduk.

Dornbusch, F. R., & Startz, R. (2008). *Makroekonomi Edisi Bahasa Indonesia* . Jakarta: PT Media Global Edukasi.

Erlangga, A., Falevi, M. R., Putri, P., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh Upah Minimum dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 2014-2023. *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan (KEAT), 1*(2), 161-177.

Garnella , R., Wahid, N. A., & Yulindawati . (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh. *Jimebis, 1*(1), 21-35.

Hadi, A. S., Riani, W., & Haryatiningsih, R. (2022). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2016-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies, 2*(2), 446-454.

Jhingan, M. (2018). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kairupan, S. P. (2013). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012. *Jurnal EMBA Vol.1 No.4*, 2206-2216.

Machmud, A. (2016). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi), 9*(1), 51-72.

Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Makroeconomics.* Cengage Learning.

Marliana, L. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business Vol 6 No.1*, 87-91.

Mulyaningsih. (2019). *Pembangunan Ekonomi.* CV KIMFA MANDIRI.

Naf'an. (2022). *Ekonomi makro : tinjauan ekonomi syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Potabuga, M. L., Rorong, I. P., & Siwu, H. F. (2024). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 24. No.6*, 85-98.

Priyono , & Ismail, Z. (2012). *Teori Ekonomi.* Dharma Ilmu.

Purnamawati, I. G., & Yuniarta, G. A. (2021). *Ekonomi Makro : Teori dan Kebijakan.* Depok: Rajawali Pers.

Putri, W. O. (2025). Pengaruh Upah Minimum Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sumatera Barat. 24-26.

Rosalia, S. (2022). Analisis pengaruh pendapatan perkapita, jumlah konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata, 2*(1), 46-57.

Sadono, S. (2006). *Makroekonomi.* Raja Grafindo Persada.

Sadono, S. (2010). *Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga.* Jakarta: PT. Raja Grasindo Perseda.

Sahara, W. A., & Iryani, N. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 9*(1), 28-43.

Sahara, W. A., & Iryani, N. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 9*(1), 28-43.

Salsabila, S. I., Nabila, S., Rianti, R. A., Priyoga, D., & Sujianto, A. E. (2024). Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Timur Periode 2018-2022. *Journal of Administrative and Sosial Science (JASS), 5*(1), 92-107.

Saputra, R., Salmah , E., & Sujadi. (2024). Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Mataram Tahun 2008-2022. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora), 10*(2), 328-337.

Sari, S. G. (2020). Determinan Penangguran Usia Muda di Wilayah Perkotaan Tahun 2016-2019. *Journal of Economics and Business Aseanomics*, 134–143.

Sari, Y., Nasrun, A., & Putri, A. K. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Vol. 8 (1)*, 1-13.

Siahaan, O., Pardede, R. B., Rahim, R., & Desmawan, D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 1 No. 1*, 55-63.

Soeharjoto, & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, 5*(2), 94-102.

Sugiono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi III).* Bandung: Alfabeta.

Suhartini, E., Yumarni , A., Maryam, S., & Mulyadi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah.* Depok: Rajawali Pers.

Sukirno, S. (2008). *Mikro Ekonomi.Teori Pengantar.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumarsono, S. (2018). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suparmono. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Suroya, A., & Erdkhadifa, R. (2023). Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022. *Jurnal EK&BI, 6*(1), 192-206.

Syahputra, A., Erfit, & Nurhayani. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 8. No. 2*, 95-106.

Syera, I. A., & Ningsih, S. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Medan. *SENASHTEK 2024*, 397-402.

Tahir, K. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi investasi, upah minimum provinsi terhadap penyerahan tenaga kerja di sulawesi selatan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 1*(2), 110-132.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development.* Pearson Education.

Wati, I. M., Utami, A. F., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Angkatan Kerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 10 No. 18*, 499-513.

Yudhistiara , S. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengangguran. *Skripsi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Universitas Islam Indonesia*.

Yuniarti, Q., & Imaningsih, N. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. *Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6*(1), 44-52.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Aceh

Kabupaten/Kota	Tahun	IPM	UMP	UMP_ribu	TPT
SIMEULUE	2017	64.41	2500000	2500,0	3.12
SIMEULUE	2018	64.74	2700000	2700,0	4.95
SIMEULUE	2019	65.7	2916810	2916,8	5.82
SIMEULUE	2020	66.03	3165031	3165,0	5.47
SIMEULUE	2021	66.41	3165031	3165,0	5.71
SIMEULUE	2022	67.27	3166460	3166,5	6
SIMEULUE	2023	68.06	3413666	3413,7	5.85
SIMEULUE	2024	69.01	3460672	3460,7	5.5
ACEH SINGKIL	2017	67.37	2500000	2500,0	7.14
ACEH SINGKIL	2018	68.02	2700000	2700,0	7.96
ACEH SINGKIL	2019	68.91	2916810	2916,8	8.58
ACEH SINGKIL	2020	68.94	3165031	3165,0	8.24
ACEH SINGKIL	2021	69.22	3165031	3165,0	8.36
ACEH SINGKIL	2022	69.62	3166460	3166,5	6.88
ACEH SINGKIL	2023	70.14	3413666	3413,7	6.84
ACEH SINGKIL	2024	70.75	3460672	3460,7	6.44
ACEH SELATAN	2017	65.03	2500000	2500,0	7.24
ACEH SELATAN	2018	65.92	2700000	2700,0	6.03
ACEH SELATAN	2019	66.9	2916810	2916,8	6.54
ACEH SELATAN	2020	67.12	3165031	3165,0	6.54
ACEH SELATAN	2021	67.44	3165031	3165,0	6.46
ACEH SELATAN	2022	67.87	3166460	3166,5	4.82
ACEH SELATAN	2023	68.44	3413666	3413,7	4.73
ACEH SELATAN	2024	69.1	3460672	3460,7	4.56
ACEH TENGGARA	2017	68.09	2500000	2500,0	4.75
ACEH TENGGARA	2018	68.67	2700000	2700,0	3.75
ACEH TENGGARA	2019	69.36	2916810	2916,8	3.45
ACEH TENGGARA	2020	69.37	3165031	3165,0	5.72
ACEH TENGGARA	2021	69.44	3165031	3165,0	6.43
ACEH TENGGARA	2022	70.32	3166460	3166,5	5.09
ACEH TENGGARA	2023	71.05	3413666	3413,7	5
ACEH TENGGARA	2024	71.7	3460672	3460,7	4.79
ACEH TIMUR	2017	66.32	2500000	2500,0	8.42
ACEH TIMUR	2018	66.82	2700000	2700,0	6.92
ACEH TIMUR	2019	67.39	2916810	2916,8	7.61
ACEH TIMUR	2020	67.63	3165031	3165,0	7.26
ACEH TIMUR	2021	67.83	3165031	3165,0	7.13

ACEH TIMUR	2022	68.72	3166460	3166,5	8.07
ACEH TIMUR	2023	69.32	3413666	3413,7	8.03
ACEH TIMUR	2024	69.87	3460672	3460,7	7.75
ACEH TENGAH	2017	72.19	2500000	2500,0	3.91
ACEH TENGAH	2018	72.64	2700000	2700,0	2.11
ACEH TENGAH	2019	73.14	2916810	2916,8	2.65
ACEH TENGAH	2020	73.24	3165031	3165,0	3.05
ACEH TENGAH	2021	73.37	3165031	3165,0	2.61
ACEH TENGAH	2022	73.95	3166460	3166,5	4.44
ACEH TENGAH	2023	74.6	3413666	3413,7	4.42
ACEH TENGAH	2024	75.41	3460672	3460,7	4.21
ACEH BARAT	2017	70.2	2500000	2500,0	6.2
ACEH BARAT	2018	70.47	2700000	2700,0	8.58
ACEH BARAT	2019	71.22	2916810	2916,8	7.41
ACEH BARAT	2020	71.38	3165031	3165,0	7.3
ACEH BARAT	2021	71.67	3165031	3165,0	7.09
ACEH BARAT	2022	72.34	3166460	3166,5	6.09
ACEH BARAT	2023	72.88	3413666	3413,7	6.07
ACEH BARAT	2024	73.69	3460672	3460,7	5.58
ACEH BESAR	2017	72	2500000	2500,0	8.49
ACEH BESAR	2018	72.73	2700000	2700,0	7.29
ACEH BESAR	2019	73.55	2916810	2916,8	7.67
ACEH BESAR	2020	73.56	3165031	3165,0	7.62
ACEH BESAR	2021	73.58	3165031	3165,0	7.7
ACEH BESAR	2022	74	3166460	3166,5	8.28
ACEH BESAR	2023	74.53	3413666	3413,7	8.17
ACEH BESAR	2024	75.13	3460672	3460,7	7.93
PIDIE	2017	69.52	2500000	2500,0	7.64
PIDIE	2018	69.93	2700000	2700,0	7.24
PIDIE	2019	70.41	2916810	2916,8	6.83
PIDIE	2020	70.63	3165031	3165,0	6.45
PIDIE	2021	70.7	3165031	3165,0	7.28
PIDIE	2022	71.2	3166460	3166,5	5.94
PIDIE	2023	71.66	3413666	3413,7	5.92
PIDIE	2024	72.31	3460672	3460,7	5.74
BIREUEN	2017	71.11	2500000	2500,0	4.5
BIREUEN	2018	71.37	2700000	2700,0	3.52
BIREUEN	2019	72.27	2916810	2916,8	3.83
BIREUEN	2020	72.28	3165031	3165,0	4.12
BIREUEN	2021	72.33	3165031	3165,0	4.32
BIREUEN	2022	73.16	3166460	3166,5	4.2
BIREUEN	2023	73.63	3413666	3413,7	4.14
BIREUEN	2024	74.45	3460672	3460,7	3.93
ACEH UTARA	2017	67.67	2500000	2500,0	11.02

ACEH UTARA	2018	68.36	2700000	2700,0	10.14
ACEH UTARA	2019	69.22	2916810	2916,8	8.65
ACEH UTARA	2020	69.33	3165031	3165,0	8.56
ACEH UTARA	2021	69.46	3165031	3165,0	8.31
ACEH UTARA	2022	70.22	3166460	3166,5	7.08
ACEH UTARA	2023	70.87	3413666	3413,7	7.07
ACEH UTARA	2024	71.7	3460672	3460,7	6.88
ACEH BARAT DAYA	2017	65.09	2500000	2500,0	3.16
ACEH BARAT DAYA	2018	65.67	2700000	2700,0	3.93
ACEH BARAT DAYA	2019	66.56	2916810	2916,8	4.29
ACEH BARAT DAYA	2020	66.75	3165031	3165,0	3.93
ACEH BARAT DAYA	2021	66.99	3165031	3165,0	4.04
ACEH BARAT DAYA	2022	67.41	3166460	3166,5	4.12
ACEH BARAT DAYA	2023	68.07	3413666	3413,7	4.08
ACEH BARAT DAYA	2024	68.75	3460672	3460,7	3.83
GAYO LUES	2017	65.01	2500000	2500,0	1.71
GAYO LUES	2018	65.88	2700000	2700,0	2.49
GAYO LUES	2019	66.87	2916810	2916,8	1.74
GAYO LUES	2020	67.22	3165031	3165,0	2.01
GAYO LUES	2021	67.56	3165031	3165,0	1.84
GAYO LUES	2022	68.25	3166460	3166,5	2.7
GAYO LUES	2023	68.93	3413666	3413,7	2.65
GAYO LUES	2024	69.83	3460672	3460,7	2.4
ACEH TAMIANG	2017	67.99	2500000	2500,0	5.43
ACEH TAMIANG	2018	68.45	2700000	2700,0	6.21
ACEH TAMIANG	2019	69.23	2916810	2916,8	6.04
ACEH TAMIANG	2020	69.24	3201143	3201,1	7.97
ACEH TAMIANG	2021	69.48	3211143	3211,1	5.87
ACEH TAMIANG	2022	70.43	3456603	3456,6	7.38
ACEH TAMIANG	2023	71.35	3456603	3456,6	7.21
ACEH TAMIANG	2024	72.32	3491031	3491,0	6.95
NAGAN RAYA	2017	67.78	2500000	2500,0	4.11
NAGAN RAYA	2018	68.15	2700000	2700,0	5.91
NAGAN RAYA	2019	69.11	2916810	2916,8	5.35
NAGAN RAYA	2020	69.18	3165031	3165,0	5.11
NAGAN RAYA	2021	69.31	3165031	3165,0	4.99
NAGAN RAYA	2022	70.1	3166460	3166,5	5.84
NAGAN RAYA	2023	70.78	3413666	3413,7	5.74

NAGAN RAYA	2024	71.72	3460672	3460,7	5.22
ACEH JAYA	2017	68.07	2500000	2500,0	6.23
ACEH JAYA	2018	68.83	2700000	2700,0	4.91
ACEH JAYA	2019	69.74	2916810	2916,8	4.18
ACEH JAYA	2020	69.75	3165031	3165,0	4.08
ACEH JAYA	2021	69.84	3165031	3165,0	3.47
ACEH JAYA	2022	70.36	3166460	3166,5	3.12
ACEH JAYA	2023	70.88	3413666	3413,7	2.88
ACEH JAYA	2024	71.83	3460672	3460,7	2.75
BENER MERIAH	2017	71.89	2500000	2500,0	1.06
BENER MERIAH	2018	72.14	2700000	2700,0	1.06
BENER MERIAH	2019	72.97	2916810	2916,8	1.03
BENER MERIAH	2020	72.98	3165031	3165,0	1.35
BENER MERIAH	2021	73.27	3165031	3165,0	1.24
BENER MERIAH	2022	73.9	3166460	3166,5	2.61
BENER MERIAH	2023	74.49	3413666	3413,7	2.45
BENER MERIAH	2024	75.01	3460672	3460,7	2.2
PIDIE JAYA	2017	71.73	2500000	2500,0	4.89
PIDIE JAYA	2018	71.12	2700000	2700,0	5.02
PIDIE JAYA	2019	72.87	2916810	2916,8	4.34
PIDIE JAYA	2020	73.2	3165031	3165,0	6.58
PIDIE JAYA	2021	73.6	3165031	3165,0	3.57
PIDIE JAYA	2022	74.34	3166460	3166,5	4.4
PIDIE JAYA	2023	74.8	3413666	3413,7	4.34
PIDIE JAYA	2024	75.16	3460672	3460,7	3.82
BANDA ACEH	2017	83.95	2500000	2500,0	7.75
BANDA ACEH	2018	84.37	2948020	2948,0	7.24
BANDA ACEH	2019	85.07	3000970	3001,0	6.89
BANDA ACEH	2020	85.41	3201143	3201,1	9.54
BANDA ACEH	2021	85.71	3280327	3280,3	8.94
BANDA ACEH	2022	86.28	3540555	3540,6	8.62
BANDA ACEH	2023	86.69	3540555	3540,6	8.03
BANDA ACEH	2024	87.17	3660898	3660,9	7.55
SABANG	2017	74.1	2500000	2500,0	3
SABANG	2018	74.82	2700000	2700,0	4.19
SABANG	2019	75.77	2916810	2916,8	4.6
SABANG	2020	75.78	3165031	3165,0	4.81
SABANG	2021	76.11	3165031	3165,0	3.56
SABANG	2022	76.85	3166460	3166,5	4.01
SABANG	2023	77.52	3413666	3413,7	3.92
SABANG	2024	78.32	3460672	3460,7	2.95
LANGSA	2017	75.89	2500000	2500,0	7.03
LANGSA	2018	76.34	2700000	2700,0	7.12
LANGSA	2019	77.16	2916810	2916,8	7.69

LANGSA	2020	77.17	3165031	3165,0	9.75
LANGSA	2021	77.44	3165031	3165,0	7.21
LANGSA	2022	77.82	3166460	3166,5	7.85
LANGSA	2023	78.36	3413666	3413,7	7.73
LANGSA	2024	78.81	3460672	3460,7	7.34
LHOKSEUMAWE	2017	76.34	2500000	2500,0	10.51
LHOKSEUMAWE	2018	76.62	2700000	2700,0	12.51
LHOKSEUMAWE	2019	77.3	2916810	2916,8	11.01
LHOKSEUMAWE	2020	77.31	3165031	3165,0	11.99
LHOKSEUMAWE	2021	77.57	3165031	3165,0	11.16
LHOKSEUMAWE	2022	78.04	3166460	3166,5	9.15
LHOKSEUMAWE	2023	78.92	3413666	3413,7	8.78
LHOKSEUMAWE	2024	79.55	3460672	3460,7	8.47
SUBULUSSALAM	2017	62.88	2500000	2500,0	4.91
SUBULUSSALAM	2018	63.48	2700000	2700,0	6.44
SUBULUSSALAM	2019	64.46	2916810	2916,8	7.25
SUBULUSSALAM	2020	64.93	3165031	3165,0	6.93
SUBULUSSALAM	2021	65.27	3165031	3165,0	6.26
SUBULUSSALAM	2022	66.2	3166460	3166,5	5.75
SUBULUSSALAM	2023	67.1	3413666	3413,7	5.69
SUBULUSSALAM	2024	68.04	3460672	3460,7	5.12

Lampiran 2.

Analisis Statistik Deskriptif

	TPT	IPM	UMP
Mean	5.778315	71.51484	3069820.
Median	5.845000	70.72500	3165031.
Maximum	12.51000	87.17000	3660898.
Minimum	1.030000	62.88000	2500000.
Std. Dev.	2.278849	4.655504	319213.6
Skewness	0.169583	1.121686	-0.448773
Kurtosis	2.836874	4.646091	2.083319
Jarque-Bera	1.085936	59.35790	12.61850
Probability	0.581021	0.000000	0.001819
Sum	1063.210	13158.73	5.65E+08
Sum Sq. Dev.	950.3472	3966.290	1.86E+13
Observations	184	184	184

Lampiran 3.

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	47.313129	(22,159)	0.0000
Cross-section Chi-square	371.878718	22	0.0000

Lampiran 4.

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.316741	2	0.0095

Lampiran 5.

Estimasi Data Panel Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: TPT
Method: Panel Least Squares
Date: 04/15/26 Time: 22:45
Sample: 2017 2024
Periods included: 8
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 184

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.621641	4.964462	1.535240	0.1267
IPM	-0.380840	0.138615	-2.747459	0.0067
LOG(UMP_RIBU)	3.164644	1.527780	2.071401	0.0399

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.876373	Mean dependent var	5.778315
Adjusted R-squared	0.857712	S.D. dependent var	2.278849
S.E. of regression	0.859607	Akaike info criterion	2.661025
Sum squared resid	117.4890	Schwarz criterion	3.097837
Log likelihood	-219.8143	Hannan-Quinn criter.	2.838070
F-statistic	46.96344	Durbin-Watson stat	1.190944
Prob(F-statistic)	0.000000		

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Lampiran 6.

Uji Multikolinearitas

	IPM	LOG(UMP_R...
IPM	1	0.28627470...
LOG(U...	0.28627470...	1

Lampiran 7.

Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 04/15/26 Time: 22:52
Sample: 2017 2024
Periods included: 8
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 184

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.922656	2.538328	2.727250	0.0071
IPM	0.032458	0.070874	0.457968	0.6476
LOG(UMP_RIBU)	-1.071494	0.781153	-1.371682	0.1721

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.243312	Mean dependent var	0.646470
Adjusted R-squared	0.129095	S.D. dependent var	0.470967
S.E. of regression	0.439517	Akaike info criterion	1.319426
Sum squared resid	30.71484	Schwarz criterion	1.756238
Log likelihood	-96.38721	Hannan-Quinn criter.	1.496472
F-statistic	2.130260	Durbin-Watson stat	1.768410
Prob(F-statistic)	0.003090		

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y